

LAPORAN PENELITIAN MADYA

BIDANG KEILMUAN



**Pola Kehidupan dan Kesempatan Kerja Migran Petani
Korban Lumpur Lapindo di Daerah Tujuan**

Oleh:

Pardamean Daulay (Ketua)

pardameandaulay@ut.ac.id

Singgih Susilo (Anggota)

**JURUSAN SOSIOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS TERBUKA
2012**

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PENELITIAN MADYA BIDANG KEILMUAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
UNIVERSITAS TERBUKA

1. a. Judul Penelitian : Pola Kehidupan dan Kesempatan Kerja Migran Petani Korban Lumpur Lapindo di Daerah Tujuan
- b. Bidang Penelitian : Keilmuan
- c. Klasifikasi Penelitian : Madya
2. Ketua Peneliti
- a. Nama Lengkap & Gelar : Pardamean Daulay, S.Sos., M.Si.
- b. NIP : 19761014 200604 1 002
- c. Golongan Kepangkatan : Penata Muda Tk I /III-b
- d. Jabatan Akademik : Lektor
- e. Fakultas/Unit Kerja : FISIP/UPBJJ-UT Surabaya
- f. Program Studi : Sosiologi
3. Anggota Peneliti
- a. Jumlah Anggota : 1 (satu) Orang
- b. Nama Anggota/Unit Kerja : I. Singgih Susilo, M.Si/
- c. Program Studi : I. Geografi
4. a. Periode Penelitian : Tahun 2012
- b. Lama Penelitian : 9 (sembilan) bulan
5. Biaya Penelitian : Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah)
6. Sumber Biaya : LPPM-UT
7. Pemanfaatan Hasil Penelitian : Jurnal JOM UT



Menyetujui,
Ketua LPPM-UT

Dewi Artati Padmo Putri
NIP 19610724 198710 2 001

Surabaya, 28 Desember 2012
Peneliti


Pardamean Daulay
NIP 19761014 200604 1 002

Menyetujui,
Kepala Pusat Keilmuan

Endang Nugraheni
NIP. 19570422198503 2 001

ABSTRACT

Pardamean Daulay dan Singgih Susilo, 2012. *Life Style and Work Opportunity of Migrant Farmers Victims Lumpur Lapindo in Regional Destination*

Since the Lapindo mudflow submerges villages around it in 2006 ago, farmers and other residents had to move into some places that are considered safe. At the destination area the migrants lost their jobs as farmers and should try to get jobs opportunities and adapt to a new life. The shape and pattern of migration of farmers Lapindo mudflow victims is quite unique, because it happened to all people affected in the same time and the motive of migration is not economic factors, as most studies so far.

This study aimed to describe the migration motive which are applied by migrant farmers Lapindo mudflow victims and identifying of migrants' lifestyle and jobs opportunities at the destination. This study used a qualitative approach with a case study strategy. The data was collected through questionnaires and interviews with selected respondents snowball (snowball technique). Analysis of data using appropriate qualitative data analysis methods of Miles and Huberman (1992) point of view which divides three flow activities data analysis are: data reduction, data presentation, and drawing conclusions through verification.

The results showed that the majority of respondents chose the destination of migration which is not far from area of origin (57.15%), the choice of the area of migration based on the decision of family members and utilizing social networks of kinship (66.66%), and the migration motive is not economic factors but finding the safety (88.10%). The majority of respondents (88.10%) have received cash compensation of land and rice field from PT. Lapindo, but they have trouble getting rice field at the destination and if any are quite expensive. Jobs opportunities in the destination did not provide many options, so migrants should try to get a job, but the educational background, skills and expertise sufficiently low so difficult for them to obtain job. Family lifestyle change, which not only drape life as a farmer, but many of those who switch jobs in the informal sector, such as selling food cake, snacks for kids, Taxi motor bike (Ojek) and labour. The results of this study advised to provide capital assistance for migrant farmers Lapindo mudflow victims at the destination so that it can help and even to have a life expectancy in the future.

Keywords: Lifestyle, Work opportunities, Migrant farmers, Lapindo Mud

PRAKATA

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan hidayahnya penulis masih diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan penelitian ini.

Dalam kesempatan ini, penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan, baik moril maupun materil sampai selesainya penelitian ini. Ucapan tersebut disampaikan kepada:

1. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Terbuka, yang telah memberikan kepercayaan kepada peneliti untuk melakukan penelitian keilmuan beserta bantuan dana penelitian.
2. Kepala Pusat Penelitian Keilmuan Universitas Terbuka, Dra. Endang Nugraheni, M.Ed., M.Si yang telah banyak membantu peneliti dalam penyusunan proposal dan penyusunan laporan penelitian.
3. Kepala UPBJJ-UT Surabaya, Prof. Rusidjono, M.Pd yang telah memberikan ijin penelitian dan fasilitas untuk melaksanakan penelitian ini.
4. Bapak/Ibu warga korban lumpur Lapindo, ditengah kesulitan hidup yang harus dijalani masih menyempatkan waktu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari kami. Jawaban-jawaban dari kalianlah yang menjadi inspirasi terwujudnya laporan ini.
5. Rekan-rekan kerja di UPBJJ-UT Surabaya yang banyak memberi masukan dan saran, sehingga laporan penelitian ini dapat tersusun dengan baik.

Sebagai hamba yang dhaif, penulis menyadari bahwa laporan penelitian ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Akhirnya, kami berharap laporan penelitian ini dapat bermannfaat bagi pembaca, khususnya dalam rangka mencari solusi yang terbaik bagi pengungsi korban lumpur Lapindo di Sidoarjo.

Surabaya, Desember 2012

Peneliti

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PENGESAHAN	ii
ABSTRAK	iii
PRAKATA	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Perumusan Masalah.....	4
1.3 Tujuan Penelitian.....	4
1.4 Manfaat Penelitian.....	4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	5
2.1 Bencana Alam: Penyebab dan Dampaknya.....	5
2.2 Pengertian Petani	9
2.3 Migrasi dan Faktor Penyebabnya.....	11
2.4 Penelitian Migrasi bencana Alam yang Sudah Dilakukan.....	14
BAB III METODO PENELITIAN	16
3.1 Pendekatan Penelitian.....	16
3.2 Penentuan Responden.....	16
3.3 Teknik Pengumpulan Data.....	17
3.5 Teknik Analisis Data.....	20
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	22
4.1 Gambaran Lokasi Penelitian.....	22
4.2 Karakteristik Responden.....	25
4.3 Motif Migrasi Petani Korban Lumpur Lapindo	29
4.4 Pola Kehidupan Sosial Ekonomi Migran di Daerah Tujuan.....	34
4.5 Kesempatan Kerja Migran Petani di Daerah Tujuan.....	43
BAB V SIMPULAN DAN SARAN	47
5.1 Simpulan.....	47
5.2 Saran.....	48
DAFTAR PUSTAKA	49

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 3.1 Variabel, Dimensi, Indikator, dan Pengumpulan Data	19
Tabel 4.1 Jenis Jelamin Responden.....	25
Tabel 4.2 Status Perkawinan Responden.....	26
Tabel 4.3 Tanggungan Keluarga Responden.....	26
Tabel 4.4 Latar Belakang Pendidikan Responden.....	27
Tabel 4.5 Usia Responden.....	27
Tabel 4.6 Asal Desa Responden.....	28
Tabel 4.7 Alasan Memilih Daerah Tujuan Migrasi.....	29
Tabel 4.8 Daerah Tujuan Migrasi.....	31
Tabel 4.9 Pengambilan Keputusan Daerah Tujuan Migrasi.....	33
Tabel 4.10 Distribusi Responden Berdasarkan Jumlah Pendapatan	34
Tabel 4.11 Status Tempat Tinggal Responden di Daerah Tujuan.....	36
Tabel 4.12 Jenis Bangunan Rumah Responden di Daerah Tujuan.....	37
Tabel 4.13 Distribusi Responden Menurut Anak Yang Bersekolah.....	38
Tabel 4.14 Distribusi Responden Menurut Kunjungan Pada Sanak Keluarga...	40
Tabel 4.15 Distribusi Responden Menurut Intensitas Terjadinya Konflik di Daerah Tujuan.....	41
Tabel 4.16 Distribusi Responden Menurut Keterlibatan Dalam Kegiatan Kemasyarakatan di Lingkungan Tempat Tinggal.....	42
Tabel 4.17 Distribusi Responden Berdasarkan Penggunaan Ganti rugi.....	44
Tabel 4.18 Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan di Daerah Tujuan...	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1	Peta Letak Wilayah Kabupaten Sidoarjo.....	Halaman 22
------------	--	---------------

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanpa terasa, banjir lumpur panas Sidoarjo atau yang lebih dikenal lumpur Lapindo telah berlangsung lebih dari 6 tahun. Peristiwa semburan lumpur panas diawali dari keluarnya asap yang saat itu diduga sebagai akibat kebocoran pipa di kawasan eksplorasi sumur Banjarpanji-1 yang merupakan satu diantara 43 sumur milik PT. Lapindo Brantas Inc (LBI) di Jawa Timur. Namun, peristiwa ini menjadi suatu bencana yang maha dahsot ketika secara perlahan kebocoran tersebut memuntahkan lumpur panas dan menenggelamkan beberapa rumah, bangunan sekolah, pabrik, dan lahan pertanian yang berada di sekitarnya. Bahkan, pada saat debitnya mencapai kurang lebih 50.000 meter kubik per hari cakupan lokasi semakin meluas sehingga menenggelamkan rumah penduduk dan beratus hektar lahan pertanian milik warga di sekitar pusat semburan (Jawa Pos, 2007).

Semburan lumpur panas ini telah membawa dampak yang luar biasa bagi masyarakat sekitar dan aktivitas perekonomian di Jawa Timur. Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, melaporkan total warga yang dievakuasi pada awal munculnya lumpur sekitar 7994 jiwa atau 2064 keluarga, rumah yang rusak sebanyak 1.683 unit, 500 ha areal perkebunan rusak, dan 25 pabrik yang tenggelam terpaksa menghentikan produksinya dan merumahkan sekitar 1.873 pekerjanya. Di samping itu, lumpur Lapindo juga telah menenggelamkan areal persawahan, pemukiman penduduk, rusaknya sarana dan prasarana (jaringan listrik dan telepon), terhambatnya ruas jalan tol Malang-Surabaya yang berakibat terhadap aktivitas produksi di kawasan Tanggulangin yang selama ini merupakan salah satu kawasan industri sepatu terbesar di Jawa Timur (Illah, 2006).

Berbeda dengan bencana tsunami di Aceh, gempa bumi di Yogyakarta ataupun di Padang yang datang seketika, tanpa permisi dan tanpa diundang, langsung merenggut jiwa dan harta benda warga disekitarnya. Bencana lumpur Lapindo, memang tidak merenggut korban jiwa secara langsung, tetapi sejak

munculnya semburan lumpur, kemudian menenggelamkan rumah dan areal persawahan di sekitarnya, seluruh warga tanpa terkecuali pindah ke daerah lain yang dianggap aman. Warga melakukan migrasi tanpa didahului pertimbangan ekonomi, tetapi hanya didorong oleh keinginan untuk menyelamatkan diri dari bahaya bencana sehingga pemilihan daerah tujuan migrasi terbatas pada daerah yang dianggap aman. Migrasi dilakukan dalam rentang waktu yang cukup panjang karena belum ada kepastian kapan semburan lumpur dapat dihentikan (Akbar, 2007). Kesempatan pulang ke daerah asal dan harapan untuk dapat menghuni kembali rumah mereka sudah tidak memungkinkan lagi.

Bencana alam yang menyebabkan penduduk melakukan migrasi besar-besaran, bukanlah hal yang baru di Indonesia karena kejadian yang sama juga terjadi pada saat bencana letusan gunung kelud di Jawa Timur, gunung Krakatau di Jawa Barat, letusan gunung Tambora di Sumbawa, Gunung Merapi di Jawa Tengah, yang menyebabkan banyak penduduk harus bermigrasi sementara ke daerah yang aman dan bila keadaan sudah dianggap aman para migran kembali ke daerah asalnya. Hal ini diperkuat dari hasil penelitian Kanto (2006) tentang migrasi korban bencana tanah longsor di daerah Ampelgading Malang, yang menemukan alasan dan motif utama melakukan migrasi adalah rasa aman dari ancaman bahaya longsor, tetapi migran korban bencana di Ampelgading ini tergolong migrasi sementara atau migrasi serkuler, karena setelah longsor tidak terjadi lagi dan rumah sudah dapat ditempati mereka kembali ke desa asalnya.

Proses migrasi yang dilakukan petani korban lumpur Lapindo cukup menarik untuk diteliti karena memiliki perbedaan dengan studi-studi migrasi sebelumnya. *Pertama*, dilihat dari faktor pendorong untuk melakukan migrasi dilatarbelakangi oleh faktor keamanan semata, sedangkan studi lain menunjukkan bahwa motif seseorang melakukan migrasi berkaitan dengan faktor ekonomi, seperti harapan mendapatkan penghasilan yang lebih tinggi dan memperbaiki taraf hidup (Mantra, 1980, Lee, 1971). *Kedua*, pilihan daerah tujuan migrasi cenderung ke daerah yang dekat dengan daerah asal, sedangkan studi sebelumnya memperlihatkan seseorang memilih tujuan migrasi ke pusat-pusat industri dan pusat perdagangan yang dapat memberikan lapangan pekerjaan bagi mereka

(Wahyuni, 2003). *Ketiga*, terjadinya migrasi secara serentak dalam waktu yang bersamaan dan tidak untuk kembali ke daerah asal, sedangkan studi Tarigan (2002) menunjukkan bahwa migrasi dilakukan secara berantai mengikuti migran yang telah berhasil di daerah tujuan dan apabila sudah mencukupi baik dari segi ekonomi maupun keamanan mereka akan kembali ke daerah asal (Kanto, 2006).

Penelitian yang mengulas tentang fenomena migrasi yang dilakukan oleh korban lumpur Lapindo ini sepengetahuan peneliti belum pernah dilakukan. Studi yang paling dekat dengan masalah ini dilakukan Daulay dan Sumarmi (2010) yang menunjukkan enam mekanisme survival yang dilakukan oleh rumah tangga korban lumpur Lapindo di lokasi pengungsian, diantaranya menyasati usaha melalui migrasi sebagai pilihan terakhir. Namun, penelitian tersebut belum mengungkap secara mendalam pola kehidupan dan kesempatan kerja migran di daerah tujuan. Padahal, beberapa media massa melaporkan bahwa di daerah tujuan migran petani mengalami masalah yang paling banyak, karena disamping kehilangan tempat tinggal, mereka juga kehilangan sawah yang menjadi sumber mata pencaharian pokok selama ini. Selain itu, umumnya migran petani memiliki latar belakang pendidikan, ketrampilan dan keahlian yang tergolong rendah, sehingga mengalami masalah dalam penciptaan kesempatan kerja baru. Berbeda dengan korban lumpur Lapindo yang mempunyai pekerjaan di bidang non pertanian seperti pegawai negeri (guru, dosen, dan pegawai kantor), mereka cukup memikirkan tempat tinggal, sedangkan pekerjaan masih tetap seperti semula. Bahkan, beberapa diantaranya dilaporkan mengalami perubahan kehidupan sosial ekonomi ke arah yang lebih baik (Jawa Pos 7 Nopember 2007).

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penelitian ini dilatarbelakangi oleh suatu minat untuk melihat kelanjutan penelitian terdahulu dalam kasus yang serupa dengan masalah yang lebih terfokus pada aspek pola kehidupan dan kesempatan kerja migran petani korban lumpur Lapindo di daerah tujuan yang selama ini belum pernah terungkap oleh penelitian lain. Secara sosiologis gambaran penelitian ini sebagaimana yang diungkap di atas, cukup relevan digolongkan dalam paradigma perilaku sosial, sehingga pendekatan teori rasional layak mewarnai kerangka pemikiran dan pembahasannya.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dapat dibuat rumusan permasalahan yang tertuang dalam pertanyaan penelitian, sebagai berikut:

1. Mengapa petani korban lumpur Lapindo memilih bermigrasi ke daerah tujuan (tempat tinggal sekarang)?
2. Bagaimana gambaran kehidupan sosial ekonomi migran petani korban lumpur Lapindo di daerah tujuan?
3. Bagaimana kesempatan kerja migran petani korban lumpur Lapindo di daerah tujuan?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Mendeskripsikan alasan migran petani korban lumpur Lapindo memilih bermigrasi ke daerah tujuan (tempat tinggal sekarang).
2. Mendeskripsikan gambaran perubahan pola kehidupan sosial ekonomi migran petani korban lumpur Lapindo di daerah tujuan.
3. Mengidentifikasi kesempatan kerja migran petani korban lumpur Lapindo di daerah tujuan.

1.4 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian tentang pola kehidupan dan kesempatan kerja migran petani korban lumpur Lapindo di daerah tujuan diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis. Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumbangan bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya bidang studi sosiologi terutama memperluas pola berpikir dalam kajian migrasi terutama tentang pola migrasi korban lumpur Lapindo sehingga dapat mengungkap untuk perbaikan “atau “membantah teori migrasi” yang selama ini banyak dikemukakan oleh para ahli bahwa orang melakukan migrasi selalu motif ekonomi. Oleh karena itu, hasil penelitian ini dapat menjadi kajian ilmiah dalam jurnal nasional atau

sebagai bahan pengayaan untuk bahan ajar mata kuliah Perubahan Sosial (SOSI4305), khususnya pada bagian perubahan masyarakat pedesaan.

Secara praktis, diharapkan penelitian ini menjadi masukan kepada pemerintah dan pembuat kebijakan dalam merumuskan penanganan korban lumpur Lapindo sesuai dengan realitas kehidupan nyata para migran di daerah tujuan yang terlihat dari kehidupan sosial, ekonomi, aktivitas budaya yang mereka lakukan di daerah tujuan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Bencana Alam Sebagai Faktor Penyebab Perubahan Sosial

Secara etimologis, bencana adalah gangguan, godaan, tipuan atau sesuatu yang menyebabkan dan menimbulkan kerusakan, kerugian, penderitaan, malapetaka, kecelakaan dan marabahaya. Kata bencana selalu identik dengan situasi negatif yang dalam bahasa Inggris sepadan dengan kata *disaster*. Bencana atau *disaster* menurut Wikipedia (2012) *disaster is the impact of a natural or man-made hazards that negatively effects society or environment* (bencana adalah pengaruh alam atau ancaman yang dibuat oleh manusia yang berdampak negatif terhadap masyarakat dan lingkungan). Oleh karena itu, fenomena bencana terjadi sepanjang sejarah hidup manusia di berbagai belahan bumi.

Fenomena bencana dapat dikategorikan ke dalam dua bentuk, yakni bencana sosial dan bencana alam. Bencana sosial umumnya disebabkan oleh hubungan antarmanusia yang menimbulkan peristiwa di masyarakat, seperti terjadinya konflik politik, konflik sosial, perang antar suku, pencemaran lingkungan, dan eksploitasi alam. Sedangkan, bencana alam adalah bencana yang disebabkan adanya perubahan alam secara alami; dampaknya dapat mengganggu kestabilan masyarakat terjadinya bencana tersebut (Wardaya, 2006). Bentuk bencana alam ini bermacam-macam di antaranya adalah, *tsunami*, gempa bumi, banjir, kebakaran hutan, dan kebocoran sumber daya alam, seperti gas bumi yang memunculkan lumpur panas di Porong Sidoarjo.

Berbagai bentuk bencana alam masih menjadi permasalahan yang perlu terus dikaji, apakah murni terjadi sebagai peristiwa alam atau karena ulah manusia. Sebagian orang beranggapan bahwa bencana adalah hukuman alam; sebagian lagi menganggap bencana adalah kebetulan dan sebagian lainnya beranggapan bencana adalah mitos. Anggapan yang berbeda tersebut telah menjadi dasar bagi manusia untuk menyentuh ranah bencana sebagai pemahaman hakikat hubungan manusia dengan alam. Kluchon dalam Koentjaraningrat (1990) mengkategorikan hubungan manusia dengan alam sebagai salah satu hakikat

masalah dasar hidup manusia. Respon masyarakat terhadap munculnya berbagai bencana alam memiliki perbedaan sesuai kondisi dan karakteristik masyarakatnya. Ada manusia yang tunduk kepada alam, ada manusia yang berusaha menjaga keselarasan dengan alam, dan ada juga manusia yang berhasrat menguasai alam.

Abdullah (2006) dalam pidato pengukuhan sebagai Guru Besar Antropologi pada Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada, membagi dua bentuk respon sosial masyarakat terhadap bencana. *Pertama*, masyarakat modern mengandalkan ilmu dan teknologi dalam menghadapi bencana dan potensi bencana gempa bumi. Masyarakat modern menggunakan teknokrasi dan agaknya mengesampingkan posisi sentral manusia. *Kedua*, masyarakat lokal, pada saat berhadapan dengan bencana belum menggunakan ilmu dan teknologi sehingga mereka tidak dapat memprediksi bencana secara ilmiah karena ada anggapan peristiwa alam terjadi atas kehendak Sang Pencipta. Dalam konteks ini, masyarakat lokal lebih mengarah kepada gambaran pendekatan behavioristik, yang hanya menitikberatkan bentuk respon individu terhadap bencana.

Lebih lanjut, Abdullah (2006) menyatakan bencana dapat membangun pemaknaan sosial tentang suatu peristiwa untuk memberikan dasar membangun disposisi yang lebih kuat pada perjalanan siklus sosial selanjutnya. Abdullah (2006) membagi empat kategori pemaknaan sosial tentang bencana, yaitu:

1. bencana bukan suatu peristiwa yang tiba-tiba dan tak terelakkan, tetapi menjadi bagian yang integral dari kehidupan rutin dan normal;
2. tidak semua fenomena alam dapat dan harus menjadi bencana, karena lahirnya suatu bencana tergantung pada status kerentanan individu, kelompok, lingkungan, dan institusi;
3. bencana sebagai ujian bagi keterbatasan dan daya tahan manusia;
4. bencana merupakan peluang bagi perbaikan dan penataan hidup.

Berbagai peristiwa bencana yang terjadi belakangan ini memiliki dampak terhadap perubahan sosial, baik lingkungan maupun sosial budaya tempat terjadinya peristiwa bencana tersebut. Dampak bencana bisa berlangsung cepat, tetapi juga dapat berlangsung lambat dan hal ini tergantung pada jenis, lokasi dan jumlah korban. Terjadinya perubahan sosial secara cepat akan dilalui oleh pihak-

pihak yang terlibat tanpa disadari atau mungkin pula tidak diharapkan (Sztompka, 2007). Perubahan sosial yang dimaksud adalah perubahan yang secara general mengubah pola hubungan masyarakat dan stratifikasi sosial yang secara tidak langsung akan mengubah dan mempengaruhi norma-norma masyarakat, seperti mengubah cara (*usage*), kebiasaan (*folkways*), tata kelakuan (*mores*), dan adat istiadat (*custom*) masyarakat. Perubahan seperti ini termasuk perubahan yang mempunyai dampak luar biasa sehingga mampu mengubah tatanan dan norma sosial yang sudah mapan yang merupakan hasil dari suatu kejadian yang luar biasa (*precedent*) di masyarakat. *Precedent* dari suatu proses sosial tidak harus diorientasikan pada isu kemajuan atau progress semata karena tidak mustahil proses perubahan sosial justru mengarah kepada kemunduran atau degradasi pada sejumlah aspek atau nilai kehidupan masyarakat yang bersangkutan.

Seperti halnya yang terjadi di Porong Sidoarjo, munculnya fenomena semburan lumpur panas telah menjadi *presedent* bagi masyarakat. Fenomena semburan lumpur panas ini dapat dikatakan sebagai bentuk bencana baru karena belum pernah terjadi sebelumnya. Ada dua faktor yang membedakan bencana lumpur lapindo dengan bencana yang sudah pernah ada, yaitu (1) sumber bencana yang tidak jelas kapan akan berhenti, dan (2) adanya pandangan bahwa semburan lumpur tersebut termasuk kategori bencana alam atau non alam. Apapun faktor penyebabnya yang pasti semburan lumpur panas telah mengakibatkan kerugian bagi korban tidak hanya sebatas pada persoalan fisik lingkungan yang berada di sekitar wilayah bencana saja, tetapi juga aspek sosial budaya juga mulai berubah secara perlahan-lahan maupun dalam bentuk yang cepat.

Soeratmo dalam (Dahriani, 1995) mengemukakan perubahan sosial dapat dilihat dari aspek kehidupan sosial ekonomi yang meliputi antara lain:

1. Aspek sosial demografi meliputi: pembaharuan sosial, tingkah laku, motivasi masyarakat, serta kependudukan dan migrasi.
2. Aspek ekonomi meliputi: kesempatan kerja, tingkat pendapatan dan pemilikan barang.
3. Aspek pelayanan sosial meliputi: sarana pendidikan, sarana kesehatan, sarana olahraga dan sarana transportasi.

Sedangkan Melly G. Tang dalam (Dahriani, 1995) mengemukakan bahwa aspek perubahan kehidupan sosial ekonomi mencakup tiga unsur, yaitu pekerjaan, pendidikan, dan kesehatan. Ketiga unsur kehidupan sosial ekonomi tersebut akan terwujud dalam kesejahteraan sosial. Ukuran-ukuran peningkatan atau perubahan kesejahteraan sosial dapat dilihat dari tiga aspek kualitas hidup seseorang, antara lain; (1) aspek materi seperti: keadaan rumah, bahan rumah tangga, dan bahan pangan, (2) aspek fisik seperti: kesehatan tubuh, dan lingkungan alam, dan (3) aspek spiritual seperti: moral, etika, keserasian, dan penyesuaian. Dalam konteks penelitian ini bencana alam sebagai penyebab perubahan sosial diamati dari aspek perubahan pekerjaan, pendapatan, pendidikan, dan kehidupan sosial budaya migran korban lumpur Lapindo di daerah tujuan.

2.2 Pengertian Petani

Petani atau konsep *peasant*, bahkan penerjemahan kata *peasant* menjadi petani masih menjadi perdebatan yang belum tuntas dalam kancah ilmu sosial. Amri Marjali, (1993) mencoba mengklasifikasikan konsep petani ke dalam tiga corak pemikiran. *Pertama*, semua orang yang hidup di desa secara umum tanpa membedakan jenis pekerjaannya. *Kedua*, keseluruhan penduduk pedesaan yang bekerja sebagai petani dan, *Ketiga*, golongan petani yang memiliki lahan yang digarap sendiri untuk menghasilkan produk guna memenuhi kebutuhan hidupnya.

Namun, untuk kasus pedesaan di Indonesia konsep tersebut tidak dapat diterapkan secara umum, khususnya di Jawa, karena terdapat perbedaan yang beragam dalam pendefinisian petani, diantaranya; *pertama*, ada pemilik tanah pertanian, namun tidak pernah mengolah tanahnya disebut “petani pemilik”. *kedua*, ada petani yang memiliki tanah dan menggarap sendiri lahannya disebut “petani pemilik-penggarap”. *ketiga*, petani yang tidak memiliki tanah, tapi menyewa lahan dan mengolahnya disebut “petani penyewa-penggarap”. *keempat*, petani tanpa tanah yang mengolah tanah orang lain untuk mendapatkan upah disebut “buruh tani” (Marzali, 1993). Sebaliknya, pemahaman tentang petani seperti di atas, akan berbeda konteks ketika kita melihat di luar Jawa, misalnya di pedalaman Kalimantan yang sistem pertaniannya ladang berpindah. Untuk kasus

penelitian ini konsep petani lebih dekat dikategorikan sebagai petani pemilik penggarap, yaitu petani yang memiliki tanah dan menggarap sendiri lahannya.

Berdasarkan definisi petani di atas dapat disimpulkan bahwa petani memiliki sifat subsisten, pembagian kerja tradisional dan mengenal pasar sebatas memenuhi kebutuhan hidup. Namun, dari sudut susunan dan sistem perekonomian, petani telah banyak mengalami perubahan akibat berbagai macam taraf perubahan dan taraf pengaruh unsur-unsur masyarakat kota serta sistem ekonomi modern. Meski demikian pada beberapa sisi masyarakat desa masih memiliki berbagai ciri pokok yang dominan dan berbeda dengan masyarakat kota. Sebagai contoh mentalitas petani adalah ciri yang sangat berbeda dengan masyarakat kota, dan mentalitas ini tentu akan berpengaruh pada sistem budaya desa. Demikian juga halnya dengan migran petani korban lumpur Lapindo di daerah tujuan, merasa tenang sepanjang kebutuhan hidupnya terpenuhi dan tradisi-tradisi leluhur tetap dilestarikan.

Dalam masyarakat yang lebih luas, struktur kekuasaan, baik mewujudkan sebagai raja, negara atau pemilik modal, selalu menempatkan petani pada posisi terbawah. Namun, hubungan vertikal antara petani dan lapisan sosial di atasnya tidak selalu bersifat eksploitatif. Menurut Scott (1981) ada norma resiprositas dan etika subsistensi yang menempatkan hubungan patron-klien antara petani dan pemilik tanah sebagai hubungan yang menguntungkan kedua belah pihak. Scott (1981) melihat kolonialisme mendorong komersialisasi pertanian di desa yang menyebabkan hilangnya tanah komunal menjadi tanah milik pribadi, kedudukan pemilik tanah semakin kuat berbasiskan kepemilikan terhadap alat produksi.

Popkin (1986) memberikan pandangan tentang petani yang bertolak belakang dengan Scott. Menurutnya, meskipun kehidupan ekonomi petani selalu berada di sekitar garis subsistensi, namun petani sebagai makhluk yang memiliki rasionalitas akan terus berusaha memaksimalkan sumber daya dan kemakmuran sendiri tanpa memperdulikan moral pedesaan. Tindakan sosial yang dilakukan petani tidak semata karena alasan moral dan solidaritas, tapi juga dengan pertimbangan manfaat yang bisa diperolehnya dari tindakan tersebut.

Apa yang dijelaskan Popkin (1986) terwujud dalam kasus petani yang terkena semburan lumpur Lapindo, dimana mereka berani menolak semua kebijakan dari PT Lapindo maupun pemerintah, selama kebijakan tersebut merugikan mereka. Petani ingin perubahan sosial ekonomi yang lebih baik dibanding sewaktu hidup di daerah asal. Petani sudah dirugikan secara non finansial, seperti mereka berpisah bercerai berai dengan tetangga di daerah asal, mereka para petani harus kehilangan mata pencaharian dan lahan sawahnya, mereka dan keluarganya kehilangan lokasi makam bagi leluhur keluarganya yang telah meninggal, belum masalah lainnya yang dianggap sangat asing yang ditemui di daerah tujuan, seperti bertempat tinggal di pengungsian Pasar Porong dengan fasilitas yang sangat kurang dan tidak layak bagi ukuran sebuah keluarga petani (Jawa Pos, 20 Januari 2008). Keberanian penolakan petani korban Lapindo ini sebenarnya juga telah dilakukan oleh petani yang terdahulu seperti penolakan atau pembelotan petani dalam modernisasi pertanian. Studi Parsons (1966), Tilly (1981), Scott (2000), dan Giddens (1995), menjelaskan bahwa modernisasi pertanian menyebabkan perubahan sosial berupa berubahnya tatanan lembaga dalam masyarakat berimbas kepada kehidupan individu yang bernaung dibawahnya. Perubahan tidak hanya menerima modernisasi tetapi juga penolakan, pembangkangan, pergolakan, dan perlawanan secara individu maupun kolektif.

2.3. Migrasi dan Faktor Penyebabnya

Konsep mobilitas penduduk secara geografis atau spasial adalah gerak penduduk dari suatu wilayah ke wilayah lain dalam jangka waktu tertentu. Walaupun sepakat dan sama dalam pembagian konsep mobilitas penduduk, tetapi dari pengertian sirkulasi dan migrasi penduduk mempunyai persepsi waktu yang berbeda. Mantra (1983), mengemukakan bahwa migrasi adalah perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain dengan maksud menetap di daerah tujuan, sedangkan Hugo (1986) menjelaskan bahwa sirkulasi adalah penduduk yang pergi meninggalkan desanya terus menerus dengan waktu 6 bulan. Dari konteks pengertian sirkulasi dan migrasi tersebut, maka warga korban lapindo yang pindah ke daerah lain sejak pertengahan tahun 2006 dan dipastikan tidak

akan kembali ke daerah asal (tempat tinggal di daerah asal) karena sudah terbenam oleh lumpur termasuk dalam konsep migrasi.

Wulan (2010) merangkum berbagai pendekatan dalam menjelaskan proses migrasi didominasi oleh pendekatan teori ekonomi (Todaro, 1978), pendekatan psikologi (Fawcett, 1978), dan pendekatan demografi dan geografi (Lee, 1970; Hugo, 1975; dan Mantra, 1981). Beberapa teori yang mengacu pada paradigma ekonomi, misalnya (1) teori *Neoclassical Economic Macro* yang menjelaskan perpindahan para pekerja dari daerah yang kelebihan tenaga kerja dan kekurangan modal menuju ke daerah yang kekurangan tenaga kerja tetapi memiliki modal besar (Massey, dkk,1993; 1998 dan Hugo, dkk., 1996b), (2) teori *Neoclassical Economic Micro*, yang menyarankan kepada para migran potensial agar pengambilan keputusan bermigrasi mempertimbangkan biaya dan keuntungan perpindahan ke daerah tujuan yang memiliki potensi lebih besar dibandingkan daerah asalnya (Massey, 1993:434), (3) teori *Segmented Labour Market* yang menyatakan, bahwa seseorang melakukan migrasi karena ditentukan oleh tingginya permintaan pasar kerja di daerah tujuan (Todaro, 1997; Massey, dkk,1993; dan Abella, 1999), (4) teori push faktor, yang menyatakan, bahwa seseorang mengambil keputusan untuk bermigrasi sangat ditentukan oleh faktor atau tekanan yang ada di daerah asal (Lee, 1976; Mantra,1981). Menurut teori ini ada 4 faktor yang mendorong orang mengambil keputusan migrasi, yaitu : faktor yang terdapat di daerah asal (dorong), faktor yang ada di daerah tujuan (tarik), faktor penghalang, dan faktor pribadi, dan (5) teori migrasi berantai, teori ini menerangkan proses pengambilan keputusan seseorang untuk melakukan migrasi yang dikaitkan dengan keberadaan teman atau kawan yang ada di daerah tujuan akan meningkatkan keberanian seseorang meninggalkan daerah asalnya.

Teori-teori pengambilan keputusan yang dikemukakan di atas belum bisa menjelaskan pengambilan sikap untuk bermigrasi atau tidak. Oleh sebab itu, teori pilihan rasional (*Rational Choice Theory*) atau teori tindakan rasional (*Rational Action Theory*) dari perspektif sosiologi Weber (1969) berupaya memahami tindakan-tindakan sosial dengan jalan menguraikan dan menjelaskan sebab-sebab dari sesuatu tindakan dilakukan penting juga dikemukakan dalam menganalisis

migrasi petani korban lumpur Lapindo. Konsep-konsep teori pilihan rasional digunakan untuk melihat bagaimana tindakan sosial dibangun sebagai bentuk rasionalitas keluarga migran petani korban lumpur lapindo. Weber menyatakan bahwa tindakan sosial seseorang dipengaruhi oleh empat faktor sebagai berikut:

1. *Zweck rational*, adalah tindakan sosial yang mendasarkan pada pertimbangan manusia yang rasional di dalam merespon kondisi eksternalnya (termasuk tanggapan terhadap orang lain di luar dirinya dalam upaya mencapai tujuan yang maksimal dengan pengorbanan yang seminimal mungkin).
2. *Wert rational*, merupakan tindakan yang rasional tetapi mendasarkan diri pada keyakinan akan nilai-nilai absolut tertentu, seperti nilai keagamaan, etika dan estetika atau nilai lainnya yang diyakini.
3. *Affectual*, merupakan suatu tindakan sosial yang lahir dari adanya dorongan atau motivasi yang bersifat emosional, seperti dorongan rasa marah atau tindakan yang didasari oleh rasa cinta, kasih sayang dan sejenisnya.
4. *Traditional*, adalah tindakan yang berhunung dengan orientasi atau dorongan tradisi masa lampau, yang dianggap mulia dan berdasarkan hukum-hukum normatif yang menjadi kesepakatan masyarakat (Siahaan, 1983).

Dalam perspektif teori rasional, setiap orang bebas memanipulasi dan menentukan kombinasi yang paling memungkinkan dan paling sesuai dengan pemikiran sang pengambil keputusan. Tonkiss dalam Syahyuti (2008) menjelaskan proses migrasi dilakukan dengan memperhitungkan terlebih dahulu peluang dan kesempatan kerja sebagai jaminan hidup di tempat tujuan. Salah satu bentuk jaminan yang mereka pergunakan adalah pemanfaatan jaringan sosial (*social net*). Jaringan sosial dapat dimaknai sebagai jaringan yang bersifat informal dan cenderung digunakan untuk mengatasi berbagai kesulitan yang dihadapi di daerah tujuan. Jaringan sosial juga menjadi "titik masuk" terbesar untuk mendapatkan pekerjaan, tempat tinggal, sumber pinjaman dan menyimpan uang (pendapatan) yang mereka peroleh di tempat tujuan. Penelusuran mengenai jaringan sosial diharapkan dapat menunjukkan upaya yang dilakukan para migran petani korban lumpu Lapindo dalam mengembangkan dan memelihara hubungan-hubungan sosial dengan sesama migran di daerah tujuan.

2.4 Penelitian Migrasi Bencana Alam yang Relepan

Fenomena migrasi selalu dilakukan melalui proses pengambilan keputusan berdasarkan berbagai pertimbangan yang mendalam, termasuk pemilihan daerah tujuan migrasi sehingga luput dari fenomena perpindahan yang dilakukan tanpa pertimbangan mendalam, tetapi semata-mata untuk mempertahankan diri, baik sementara waktu maupun untuk selamanya karena daerah tempat tinggal mereka tidak mungkin dihuni kembali. Fenomena kependudukan ini dikenal sebagai migrasi terpaksa (*forced migration*) (Noveria (2007)). Satu-satunya alasan yang mendorong kegiatan migrasi terpaksa adalah keinginan untuk menyelamatkan diri dari bahaya bencana. Terjadinya bencana alam yang sering menelan korban jiwa selalu diikuti juga migrasi penduduk secara besar-besaran untuk meninggalkan daerah asal yang terkena bencana ke daerah lain yang dianggap aman.

Studi terdahulu tentang migrasi sebagai akibat dari bencana alam (migrasi terpaksa) menunjukkan bahwa sangat sulit mengajak penduduk untuk bermigrasi sebelum terjadi bencana. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mantra (1985), di daerah rawan bencana sebagai akibat meletusnya gunung merapi di Kabupaten Sleman, menunjukkan bahwa hampir semua penduduk tidak mau meninggalkan tempat tinggalnya, dan mereka memilih tetap bertahan di tempat tinggalnya, karena mereka memiliki anggapan letusan gunung berapi belum tentu meletus.

Kejadian bencana alam yang menyebabkan migrasi besar-besaran, sebelumnya juga telah terjadi pada letusan gunung kelud di Jawa –Timur, gunung Krakatau di Jawa -Barat, letusan gunung Tambora di Sumbawa dan letusan Gunung Merapi di Jawa-Tengah yang menyebabkan banyak penduduk yang harus migrasi ke daerah-daerah aman baik migrasi sirkuler maupun migrasi tetap. Umumnya mereka yang telah bermigrasi ke daerah lain, apabila keadaan sudah dianggap aman para migran kembali ke daerah asalnya.

Sedangkan hasil penelitian migrasi di daerah tujuan akibat bencana tanah longsor yang dilakukan oleh Kanto (2006) di daerah Ampelgading Malang, menjelaskan bahwa mereka pindah ke daerah tujuan, karena alasan dan motif utamanya adalah rasa aman dari ancaman bahaya bencana tanah longsor. Sedangkan bentuk migrasi pada migran korban bencana di Ampelgading sebagian

besar merupakan migrasi sementara atau migrasi sirkuler, karena setelah longsor tidak terjadi lagi, penduduk kembali ke desa asal.

Beberapa kajian migrasi akibat bencana alam tersebut dapat dipergunakan sebagai suatu rujukan yang menjembatani dalam menelaah migrasi petani korban lumpur Lapindo, yang menurut peneliti migrasi korban lumpur Lapindo juga tergolong migrasi akibat bencana alam. Namun, migrasi yang dilakukan oleh korban Lumpur Lapindo adalah untuk selamanya karena tidak ada kemungkinan bagi mereka untuk kembali ke daerah asal. Kemudian penelitian ini juga akan mengamati perubahan kehidupan sosial ekonomi dan budaya para migran di daerah tujuan yang belum terungkap dari beberapa penelitian terdahulu.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini memfokuskan perhatian pada masyarakat korban lumpur Lapindo yang saat ini berada di daerah tujuan migrasi (lokasi perpindahan). Penelitian bertujuan untuk melihat perubahan pola kehidupan rumah tangga petani, baik kehidupan ekonomi, sosial, budaya maupun permasalahan lain yang muncul di daerah tujuan (Dahriani, 1995). Sesuai dengan tujuan tersebut, maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif (*deskriptif research*) dengan mengambil sampel satu populasi menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data utama atau disebut juga penelitian survei (Singarimbun, 1989).

3.2. Penentuan Responden

Populasi penelitian ini adalah seluruh warga masyarakat korban lumpur Lapindo. Responden penelitian ditentukan berdasarkan daerah asal yaitu, desa Renokenongo, Mindi, dan Jarak. Ketiga desa tersebut dipilih karena sebelum munculnya kasus lumpur Lapindo, desa-desa tersebut dikenal sebagai daerah yang memiliki lahan pertanian yang luas, sehingga penduduk di sekitarnya banyak yang bekerja sebagai petani, baik petani penggarap, buruh tani, dan petani pemilik. Namun, dalam proses pengumpulan data, peneliti mengalami kesulitan menemukan responden (migran petani korban lumpur Lapindo) yang berasal dari ketiga desa tersebut. Oleh karena itu, penentuan responden tidak dibatasi pada tiga desa tersebut, tetapi seluruh migran korban lumpur Lapindo yang sebelum munculnya kasus lumpur Lapindo memiliki pekerjaan utama sebagai petani.

Untuk memperoleh responden penelitian yang sesuai, maka langkah awal yang dilakukan adalah mencari informan (orang yang memberi keterangan tentang orang lain). Penentuan informan dilakukan melalui metode bola salju sebagaimana yang dikemukakan oleh Faisal (1990), yaitu aktivitas yang berkaitan dengan usaha mendapatkan data yang benar-benar terjamin dimulai dengan mencari informan dan selanjutnya menemukan beberapa orang yang dapat

memberikan informasi lengkap sesuai dengan tujuan penelitian. Perolehan data awal dilakukan dengan cara pendataan seluruh migran petani korban lumpur Lapindo. Upaya tersebut dimulai dengan melakukan pendekatan kepada aparat pemerintah desa dan pegawai Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS). Beranjak dari informasi yang diperoleh, selanjutnya peneliti melakukan pendekatan dan berusaha membina hubungan baik terhadap seluruh responden korban lumpur Lapindo yang ada di lokasi penelitian. Peneliti hanya menemukan 42 orang, sehingga semuanya dijadikan responden. Hal ini sesuai dengan pendapat dari Arikunto (2003) yang menyebutkan bahwa apabila jumlah populasi yang tersedia kurang dari 100 maka digunakan seluruhnya sebagai sampel (total sampling).

3.3. Teknik Pengumpulan Data

Sesuai dengan tujuan penelitian, maka data yang diperlukan dalam penelitian ini mencakup data primer dan data sekunder. Data primer berkaitan dengan pola kehidupan migran petani korban lumpur Lapindo di daerah tujuan yang meliputi; bentuk dan motif migrasi; status tempat tinggal; status pekerjaan; mata pencaharian; kondisi ekonomi keluarga; pendidikan anak; hubungan dengan lingkungan sosial, adat dan tradisi; dan hubungan migran dengan koordinator korban lumpur Lapindo. Data primer ini dikumpulkan dengan menggunakan instrumen berupa kuesioner. Sebelum pengumpulan data dilakukan, kuesioner diuji coba terlebih dahulu untuk memastikan validitas dan keterandalannya.

Selain itu, pengumpulan data primer juga dilakukan melalui teknik wawancara, observasi untuk mengamati secara langsung fenomena sosial, serta pengamatan berperan serta dimana peneliti terlibat dalam berbagai kegiatan masyarakat. Hal ini dilakukan untuk memperoleh data tentang pola kehidupan dan kesempatan kerja migran petani korban lumpur Lapindo yang belum terungkap dari kuesioner. Wawancara dilakukan kepada kepala rumahtangga, istri, dan anak-anak terutama mereka yang terlibat langsung bekerja untuk membantu ekonomi keluarga. Pada saat wawancara berlangsung, peneliti menggunakan alat perekam. Alat perekam ini digunakan agar informan tidak mencurigai dan bersikap biasa

saja, sehingga ia dapat dengan leluasa menjawab pertanyaan yang dilontarkan. Keseluruhan hasil wawancara tersebut ditulis dalam catatan harian. Sementara itu, pengamatan langsung dilakukan dengan cara mengamati kegiatan para korban lumpur Lapindo, keluarganya dan masyarakat setempat. Pengamatan yang dilakukan terkait dengan aktifitas informan sewaktu bekerja dan kegiatan lain di luar kerja. Kegiatan saat bekerja disesuaikan dengan jam kerja dan tempat-tempat mereka bekerja. Sedangkan kegiatan diluar jam kerja yang diamati adalah aktifitas sosial kemasyarakatan, seperti tahlilan (wiritan pada malam hari), dan kegiatan keagamaan lainnya. Data yang diperoleh dari pengamatan langsung, berupa foto dokumentasi lengkap tentang keadaan responden diharapkan dapat mendukung dan memperkuat narasi dan argumentasi peneliti dalam melakukan analisis data.

Selain data primer, juga dilakukan telaah dokumen dari sejarah munculnya lumpur Lapindo dan proses penanggulangannya. Sejarah berguna dalam rangka menelusuri perkembangan wilayah penelitian dan masyarakat di sekitarnya. Data sekunder yang berhubungan dengan migran petani korban lumpur Lapindo di daerah tujuan dikumpulkan dari beberapa lembaga atau instansi yang memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian ini, antara lain dari Dinas Sosial Kabupaten Sidoarjo, Kantor Kecamatan di masing-masing lokasi, BPLS, Koordinator warga korban lumpur Lapindo, Kepala Desa, dan Ketua RT yang ada di lokasi penelitian. Data sekunder juga digali dari berbagai penelitian sebelumnya yang menggambarkan tentang kondisi masyarakat di sekitar lokasi semburan Lapindo atau paling tidak gambaran perkembangan penanganan para korban terutama masa awal munculnya kasus Lapindo untuk memberi gambaran lebih lengkap. Selengkapnya variabel, dimensi, indikator dan pengumpulan data dapat dilihat dalam tabel 3.1.

Tabel 3.1 Variabel, Dimensi, Indikator, dan Pengumpulan Data

Variabel	Dimensi	Indikator	Pengumpulan Data
Karakteristik Migran Petani Korban Lumpur Lapindo	Karakteristik Responden	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis Kelamin 2. Umur 3. Pendidikan 4. Perkawinan 5. Jumlah Tanggungan 6. Asal desa 	Kuesioner, wawancara
Proses Migrasi Petani Korban Lumpur Lapindo	Daerah tujuan migrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. lain dusun satu kelurahan dengan daerah asal 2. lain desa satu kecamatan 3. lain kecamatan satu kabupaten 4. lain kabupaten satu propinsi 5. migrasi ke provinsi lain. 	Kuesioner, wawancara
	Faktor pemilihan daerah tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. bisa selalu bertemu dgn keluarga 2. memudahkan urusan pelunasan ganti rugi 3. dekat dgn kerjaan 4. memberi peluang kerja 	Kuesioner, wawancara
	Motif Migrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. rasa aman (keselamatan) 2. kesempatan kerja 3. dekat dengan desa asal 4. ada sanak famili 5. motif lainnya 	Kuesioner, wawancara
	Keputusan Pemilihan Daerah Tujuan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jaringan Sosial 2. pilihan sendiri 3. pilihan anggota keluarga 	Kuesioner
Pola Kehidupan dan di daerah Tujuan	Kehidupan Ekonomi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perumahan 2. Pekerjaan 3. Penghasilan 4. Pendidikan anak 	Kuesioner, Wawancara
	Kehidupan Sosial budaya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebiasaan/norma/perilaku 2. Jaringan sosial tetangga 3. Kegiatan sosial budaya dan keagamaan 	Kuesioner
Kesempatan kerja di daerah Tujuan	Sektor pertanian dan nonpertanian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jenis-jenis kerja 2. Kesulitan memperoleh pekerjaan 3. Kesempatan kerja laki-laki dan perempuan 	Kuesioner

3.4 Teknik Analisis Data

Data primer maupun data skunder yang diperoleh dari penelitian lapangan diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif model interaktif sebagaimana yang dikembangkan Miles dan Huberman (1992). Analisis data berlangsung secara simultan yang dilakukan secara bersamaan dengan proses pengumpulan data, dengan alur tahapan sebagai berikut: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan melalui verifikasi.

Tahap pertama, pengumpulan data, dilakukan dengan cara mengumpulkan kuesioner, observasi, wawancara, dan pengamatan berperan serta.

Tahap Kedua reduksi data. Pada tahap ini peneliti melakukan kegiatan meringkas data, mengkode, menelusuri tema, membuat gugus, membuat partisi dan menulis memo. Dalam hal ini, seluruh data yang telah dikumpulkan baik dokumen, catatan lapangan, dan data statistik terlebih dahulu dilakukan editing atau diringkas karena data-data yang diperoleh tidak semuanya dibutuhkan untuk memperkuat analisis dan mendukung tujuan penelitian. Setelah itu, data-data tersebut dikelompokkan atau disederhanakan (*coding*) kedalam beberapa topik penting yang kemudian menjadi topik pembahasan.

Tahap ketiga, display data (penyajian data). Pada tahap ini peneliti melakukan pengorganisasian data dalam beberapa bentuk, yaitu: (a) kutipan pernyataan subyek penelitian untuk menggambarkan atau mendukung pandangan responden terhadap masalah-masalah yang diajukan sesuai dengan tujuan penelitian, (2) tabel untuk menggambarkan karakteristik responden, bentuk migrasi, tujuan migrasi, pola kehidupan sosial ekonomi dan kesempatan kerja migran petani korban lumpur Lapindo di daerah tujun, (c) gambar, digunakan untuk mendeskripsikan tempat tinggal rumahtangga korban lumpur lapindo, dan lokasi semburan lumpur. Keseluruhan jenis penyajian tersebut dirancang untuk menggabungkan informasi dalam bentuk yang padu dan mudah dipelajari.

Tahap keempat, kesimpulan atau verifikasi. Pada tahap ini, peneliti melakukan uji kebenaran setiap data yang muncul. Sebelum kesimpulan dari hasil temuan menjadi kesimpulan tetap peneliti, penginterpretasian kesimpulan sementara dilakukan bersama subyek penelitian, kemudian didiskusikan dengan

teman sejawat, serta masukan-masukan dari penelaah. Apabila verifikasi telah sesuai dengan kesimpulan peneliti maka temuan tersebut bisa menjadi kesimpulan penelitian. Sebaliknya bila kesimpulan peneliti belum sesuai dengan interpretasi pihak tersebut di atas, maka pencarian data, analisis dan kesimpulan dirumuskan kembali oleh peneliti.

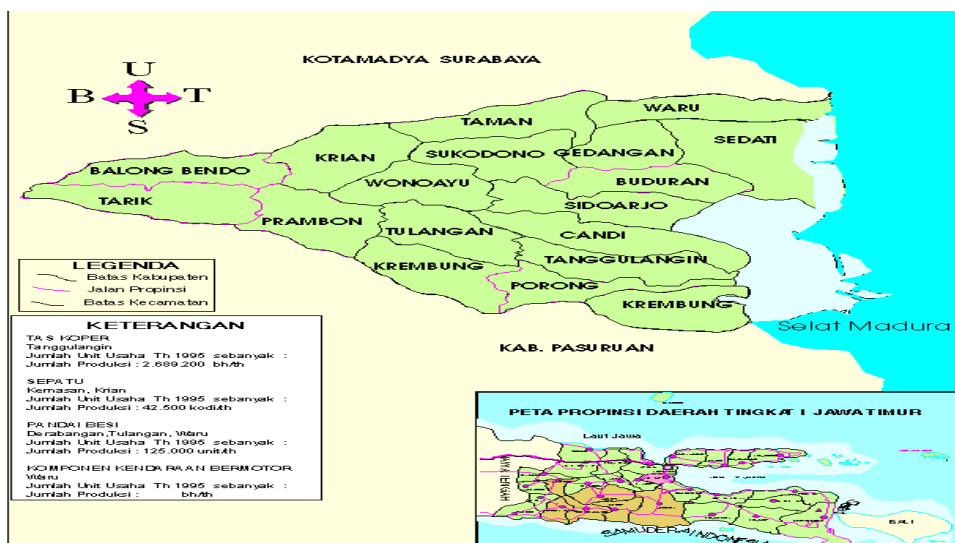
BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Lokasi Penelitian

Sidoarjo sebelum terjadinya semburan lumpur Lapindo berjalan dengan kemajuan yang cukup pesat, baik dalam bidang pertanian, perikanan dan bahkan perindustrian. Kemajuan tersebut terkait erat dengan letak Sidoarjo yang berada di Delta Sungai Berantas sehingga memiliki tanah pertanian yang subur dan dikenal sebagai penghasil komoditi pertanian seperti padi, tebu, dan kacang-kacangan. Selanjutnya, keberadaan selat Madura di sebelah timur menjadi potensi yang cukup besar terutama produk udang dan kepiting, sehingga kedua produk laut ini menjadi simbol kebanggaan kabupaten Sidoarjo.

Wilayah Kabupaten Sidoarjo berbatasan dengan Kota Surabaya dan Kabupaten Gresik di sebelah utara, Selat Madura di sebelah timur, sedangkan sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Mojokerto dan sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan. Selengkapnya dapat dilihat pada Peta Wilayah Kabupaten Sidoarjo.



Gambar 4.1 Peta Letak Wilayah Kabupaten Sidoarjo

Berdasarkan wilayah administratifnya, Kabupaten Sidoarjo terdiri 18 kecamatan, yaitu Kecamatan Sidoarjo, Kecamatan Tulangan, Kecamatan Wonoayu, Kecamatan Gedangan, Kecamatan Buduran, Kecamatan Tanggulangin, Kecamatan Tarik, Kecamatan Sedati, Kecamatan Candi, Kecamatan Jabon, Kecamatan Prambon, Kecamatan Sukodono, Kecamatan Porong, Kecamatan Krian, Kecamatan Taman, Kecamatan Krembung, Kecamatan Balongbendo, dan Kecamatan Waru.

Letak Kabupaten Sidoarjo yang berbatasan dengan Kota Surabaya merupakan pintu gerbang ke Kota Surabaya yang dihubungkan dengan jalan raya kelas I, merupakan peluang yang sangat strategis dalam upaya pengembangan ekonomi wilayah. Dikatakan sebagai pintu gerbang masuk ke Kota Surabaya karena kabupaten-kabupaten di sekitarnya, khususnya Kabupaten Mojokerto, Malang, dan Pasuruan apabila akan melakukan hubungan dengan Surabaya harus melewati Kabupaten Sidoarjo. Keadaan ini memberi peluang besar bagi Kabupaten Sidoarjo untuk maju karena mampu menarik manfaat dengan mengadakan hubungan melalui peningkatan aksesibilitas yang didukung oleh sarana dan prasarana, transportasi, dan komunikasi. Disamping itu, manfaat lain yang menjadi peluang besar bagi Sidoarjo adalah dapat mengadakan kontak hubungan perdagangan dengan kabupaten/kota tersebut.

Kedudukan Kabupaten Sidoarjo yang sangat strategis tersebut apabila ditinjau dari sudut pandang ekonomi memberi peluang besar dalam upaya pengembangan ekonomi, terutama di bidang industri, perdagangan, dan jasa. Dibidang perdagangan Kabupaten Sidoarjo yang merupakan produsen pertanian maupun industri yang memerlukan jalinan hubungan antar kota guna memasarkan produksi pertanian maupun industri manufaktur. Sementara itu, di sektor industri berkembang cukup pesat karena lokasi yang berdekatan dengan pusat bisnis kawasan Indonesia Timur (Surabaya), dekat dengan Pelabuhan Tanjung Perak maupun Bandar Udara Juanda, memiliki sumber daya manusia yang produktif serta kondisi sosial politik dan keamanan yang relatif stabil sehingga menarik minat investor untuk menanamkan modalnya di Sidoarjo. Pesatnya perkembangan sector industri di kabupaten Sidoarjo, berakibat terhadap pembangunan sentra-

sentra industri, misalnya di Tanggulangin dibangun sentra industri tas dan koper, di kecamatan Waru berkembang industri sandal dan sepatu, dan industri kerupuk udang di kecamatan Tulangan.

Disamping itu, beberapa sector industri yang sudah berkembang tersebut kabupaten Sidoarjo juga dikenal sebagai penghasil minyak dan gas bumi. Potensi minyak dan gas yang cukup besar mengakibatkan banyak perusahaan yang berminat membuka pengeboran minyak dan gas bumi, diantaranya PT. Lapindo Brantas Inc yang beroperasi di kecamatan Porong.

Porong terletak sekitar 14 kilometer di sebelah Selatan pusat kota Sidoarjo. Kecamatan ini berbatasan dengan kecamatan Krembung di bagian Barat, kabupaten Pasuruan di bagian Selatan, Selat Madura di bagian Timur serta kecamatan Tanggulangin dan Candi di bagian Utara. Terjadinya semburan lumpur panas pada pertengahan tahun 2006, menyisahkan persoalan pelik, sehingga kecamatan Porong mengalami kemunduran infrastruktur dan kehidupan ekonomi masyarakat mengalami kemunduran. Hal ini disebabkan banyaknya perusahaan swasta yang terpaksa menghentikan usahanya atau pindah ke daerah lain. Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sidoarjo, melaporkan bahwa sebanyak 2.299 usaha mikro kecil dan menengah terpaksa terhenti dan sebanyak 80% diantaranya merupakan usaha mikro yang ditekuni masyarakat setempat.

Sejak munculnya lumpur Lapindo, nama Porong mendadak terkenal tidak hanya di Indonesia tetapi juga sampai ke mancanegara karena pihak pemerintah dan PT Lapindo menyebut kasus tersebut sebagai bencana. Namun, Gubernur Jawa Timur pada saat itu masih dipimpin oleh Bapak Imam Utomo mengusulkan untuk menamainya "Lumpur Porong" karena pusat lumpur memang berada di kecamatan Porong. Disamping itu, memang kecamatan Porong paling memikul beban luberan lumpur dibanding dua kecamatan yang lain, yaitu Jabon dan Tanggulangin. Terdapat tiga desa yang tenggelam akibat lumpur Lapindo yaitu; Desa Renokenongo, Siring, Jatirejo dan Mindi.

Bencana lumpur Lapindo juga berdampak pada tatanan sosial yang telah lama dibangun diantara masyarakat di kecamatan Porong. Status mereka yang semula bekerja menjadi menganggur, semula mempunyai usaha menjadi

kehilangan usaha, dan yang memiliki tanah bahkan sudah menjadi juragan tanah, kemudian menjadi hilang begitu saja ditelan oleh lumpur Lapindo. Bahkan, para buruh tani, buruh tanam sudah tidak memiliki alternatif pekerjaan lagi. Anak-anak sekolah yang semula belajar dengan nyaman dan tenang, kini harus terbengkalai. Selain itu, korban lumpur Lapindo terpaksa pindah dari daerah asalnya untuk selama-lamanya karena tanah dan rumah tidak memungkinkan untuk ditempati.

Persoalannya setelah para korban lumpur Lapindo ini melakukan perpindahan ke daerah tujuan masing-masing, apakah kehidupan mereka semakin membaik. Dalam bagian selanjutnya akan dideskripsikan temuan data yang berkaitan dengan pola kehidupan sosial ekonomi dan budaya migran petani korban lumpur Lapindo di daerah tujuan, namun sebelumnya dijelaskan terlebih dahulu profil responden yang mewakili korban lumpur Lapindo.

4.2 Profil Responden

Dalam kerangka untuk mendeskripsikan hasil penelitian secara lebih utuh, maka pada bagian awal ini peneliti berusaha mendeskripsikan latar belakang ataupun profil responden. Gambaran karakteristik responden ini tentunya akan berguna untuk memperkuat dan mendukung logika analisis dalam penelitian ini. Ada 6 (enam) karakteristik responden yang akan dideskripsikan, yakni jenis kelamin, status perkawinan, tanggungan keluarga, latar belakang pendidikan, umur, kepemilikan lahan sawah, lama tinggal, dan penerimaan ganti rugi.

Temuan data menunjukkan bahwa dari 42 orang responden ada 33 orang (78,57%) yang diwakili oleh responden laki-laki, dan sisanya 9 orang (21,43%) adalah responden perempuan. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.1.

Tabel 4.1. Jenis Kelamin Responden

No	Jenis Kelamin	Jumlah	%
1	Laki-laki	33	78,57
2	Perempuan	9	21,43
	Jumlah	42	100

Sumber: Hasil Penelitian, 2012

Sementara itu, dilihat dari status perkawinan responden dapat diketahui bahwa sebanyak 40 (95,24%) berstatus kawin, sementara 2 orang (4,76%) berstatus janda/duda. Data atau gambaran status perkawinan ini bukan sekedar dimaknai sebagai penjas apakah mereka sudah menikah ataupun belum, tetapi lebih dari itu dalam konteks penelitian ini dapat berguna untuk menjelaskan beban tanggungan keluarga. Melalui data ini dapat dijelaskan bahwa responden yang berstatus kawin berarti memiliki beban tanggungan yang lebih besar dibandingkan responden yang berstatus janda/duda. Untuk lebih jelasnya status perkawinan responden dapat dilihat pada tabel 4. 2.

Tabel 4.2. Status Perkawinan Responden

No	Status Perkawinan	Jumlah	%
1	Kawin	40	95,24
2	Janda/duda	2	4,76
Jumlah		42	100

Sumber: Hasil Penelitian, 2012

Terkait dengan status perkawinan responden yang seluruhnya telah menikah, maka tanggungan kebutuhan keluarga responden akan bertambah, seperti anak, orang tua, dan kerabat lainnya. Selengkapnya, jumlah tanggungan keluarga responden dapat dilihat pada tabel 4.3.

Tabel 4.3. Tanggungan Keluarga Responden

No	Jumlah Tanggungan	Jumlah	%
1	Sedikit (1 – 3 jiwa)	14	33,33
2	Banyak (4 – 6 jiwa)	28	66,67
3	Tidak memiliki tanggungan	-	-
Jumlah		42	100

Sumber: Hasil Penelitian, 2012

Disamping ketiga karakteristik di atas, dapat dideskripsikan juga latar belakang pendidikan responden. Jika kita lihat pada tabel 4.4, terlihat bahwa 26 orang (61,91%) responden yang memiliki latar belakang pendidikan SD, tamat SLTP sebanyak 11 orang (26,19%), sedangkan yang tamat SLTA hanya 7 orang (16,66%). Data ini menunjukkan bahwa mayoritas responden cenderung diwakili oleh warga korban lumpur yang lulusan SD. Rendahnya tingkat pendidikan responden diprediksi berpengaruh terhadap kesempatan kerja di daerah tujuan. Selengkapnya latar belakang pendidikan responden dapat dilihat pada tabel 4.4.

Tabel 4.4. Latar Belakang Pendidikan Responden

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	%
1	SD	26	61,91
2	SLTP	11	26,19
3	SLTA	5	11,90
Jumlah		42	100

Sumber: Hasil Penelitian, 2012

Jika menilai dari aspek usia, kebanyakan responden memiliki usia muda. Dari sebanyak 42 responden dapat digambarkan bahwa responden yang memiliki usia 20 - < 30 tahun sebanyak 24 orang (57,15%), usia 30 – 40 tahun sebanyak 11 orang (26,19%), dan kategori usia > 40 tahun sebanyak 7 orang (16,66%). Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.5.

Tabel 4.5. Usia Responden

No	Usia Responden	Jumlah	%
1	20 - < 30	24	61,91
2	30 – 40	11	26,19
3	> 40	7	11,60
Jumlah		42	100

Sumber: Hasil Penelitian, 2012

Tabel di atas memperlihatkan bahwa rata-rata usia responden berada pada usia 30 – 30 tahun karena itu tergolong pada kelompok usia muda. Jika dikaitkan dengan usia kerja, maka responden yang mewakili warga petani korban lumpur Lapindo ini berada pada usia produktif. Data ini memberikan gambaran bahwa dengan usia yang produktif sejatinya mereka tidak mengalami kesulitan untuk mencari pekerjaan di daerah tujuan.

Sementara itu, dilihat dari asal daerah, menunjukkan bahwa dari 42 orang responden sebagian besar berasal dari desa Renokenongo sebanyak 25 orang (59,53%), disusul dari Desa Kedungbendo sebanyak 12 orang (28,57%), dan Desa Ketapang sebanyak 5 orang (11,90%). Data ini sesuai dengan temuan penelitian yang dilakukan Sukamto (2012), yang menyebutkan bahwa ketiga desa tersebut merupakan daerah yang mengalami dampak yang cukup besar di sektor pertanian. Bahkan sebelum muncul kasus lumpur Lapindo, jumlah penduduk yang bekerja sebagai petani di desa Renokenongo sebanyak 211 orang, desa Ketapang sebanyak 114 orang, dan Kedungbendo sebanyak 12 orang. Selengkapnya asal desa responden dapat dilihat pada tabel 4.6.

Tabel 4.6. Asal Desa Responden

No	Asal Desa Responden	Jumlah	%
1	Renokenongo	25	59,53
2	Ketapang	5	11,90
3	Kedungbendo	12	28,57
Jumlah		42	100

Sumber : Data Penelitian 2012

Dengan memperhatikan hasil deskripsi terhadap asal daerah responden tersebut, maka masyarakat di sekitar luapan lumpur Sidoarjo memang memiliki variasi dalam struktur pekerjaan. Temuan ini mendukung penelitian Sukamto (2012) yang menunjukkan bahwa jauh sebelum tumbuh dan berkembangnya berbagai industri makanan, mebel, rokok dan pertambangan minyak dan gas bumi di kawasan Porong, mayoritas penduduk bekerja sebagai petani dan buruh tani.

Kegiatan semacam itu terus menerus dilakukan secara turun temurun untuk menopang kehidupan mereka sehingga ketika kasus lumpur Lapindo muncul masyarakat merasa sangat terpuak bukan hanya sekedar kerugian ekonomi yang terkait dengan usaha dan mata pencaharian, tetapi juga berpengaruh pada hilangnya pekerjaan sebagai petani.

4.3 Motif Migrasi Petani Korban Lumpur Lapindo

Fenomena migrasi sebenarnya merupakan hasil dari suatu proses yang kompleks dan dipengaruhi beragam faktor penyebab. Namun, pada prinsipnya seseorang memutuskan untuk melakukan migrasi didasari oleh tingkat kesadaran atas keadaan hidupnya dan pengetahuan akan adanya alternatif lain yang dapat mengubah kehidupannya. Motif seseorang melakukan migrasi terkait dengan faktor dorongan di daerah asal dan daya tarik di daerah tujuan (Lee, 1991). Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa migrasi yang dilakukan petani korban lumpur Lapindo tidak terkait dengan faktor daya tarik di daerah tujuan, tetapi mayoritas responden menyatakan alasan utama melakukan migrasi adalah rasa aman (keselamatan), yaitu sebesar 37 orang (88,10%), dan hanya 5 orang (11,90%) yang menyatakan mengharapkan peluang dan kesempatan kerja, dan alasan memperoleh fasilitas rumah dan mendapat biaya hidup tidak ada yang menjawab. Selengkapnya alasan melakukan migrasi dapat dilihat dalam tabel 4.7.

Tabel 4.7. Alasan Melakukan Migrasi

No	Alasan melakukan Migrasi	Jumlah	%
1	Rasa aman (keselamatan)	37	88,10%
2	Memperoleh fasilitas rumah	-	-
3	Masih ada peluang dan kesempatan kerja	5	11,90%
4	Mendapat biaya hidup	-	-
Jumlah		42	100

Sumber: Data Penelitian, 2012

Tabel di atas menunjukkan bahwa rasa aman menjadi prioritas yang utama responden melakukan migrasi. Alasan faktor ekonomi sebagai pendorong untuk melakukan migrasi tidak ditemukan dalam data penelitian ini, tetapi keinginan untuk menyelamatkan diri dari bahaya luapan lumpur Lapindo menjadi alasan paling utama. Temuan data ini memperlihatkan pertentangan dengan hasil-hasil penelitian terdahulu yang umumnya lebih banyak menjelaskan bahwa seseorang melakukan migrasi karena alasan ekonomi. Penelitian Sudibia (1998) tentang mobilitas penduduk sirkuler di daerah asal yang menyimpulkan bahwa mereka melakukan migrasi didorong adanya motif ekonomi. Begitu juga hasil penelitian Susilo (2002) tentang migrasi TKI ke luar negeri di Kabupaten Tulungagung yang menyimpulkan bahwa tujuan TKI bermigrasi ke luar negeri untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang lebih besar dibandingkan di daerah asal. Sedangkan penelitian Mantra (1998) juga menemukan bahwa adanya tekanan ekonomi di daerah pedesaan menjadi alasan utama bagi penduduk untuk melakukan migrasi, seperti yang dikemukakan oleh penduduk Desa Mengi di Bali yang meninggalkan desanya untuk mencari pekerjaan dan memperbaiki hidup.

Sebaliknya, temuan data mendukung hasil penelitian migrasi di daerah tujuan akibat bencana tanah longsor yang dilakukan oleh Kanto (2006) di daerah Ampelgading Malang, yang menjelaskan bahwa penduduk pindah ke daerah tujuan karena alasan dan motif utamanya adalah rasa aman dari ancaman bahaya bencana tanah longsor. Namun, dilihat dari bentuk migrasi yang dilakukan migran korban bencana di Ampelgading tergolong migrasi sementara karena setelah longsor tidak terjadi lagi penduduk kembali lagi ke desa asalnya, sedangkan migrasi yang dilakukan korban lumpur Lapindo dalam waktu yang panjang atau migrasi untuk selamanya. Fenomena migrasi korban lumpur Lapindo inilah yang disebut Noveria (2007) sebagai migrasi terpaksa (*forced migration*), yaitu migrasi yang dilakukan tanpa didahului pertimbangan ekonomi ataupun sosial budaya, tetapi didorong oleh keinginan untuk menyelamatkan diri (alasan keamanan).

Terkait dengan alasan melakukan migrasi yang dikemukakan tersebut, ternyata berpengaruh terhadap pemilihan daerah tujuan migrasi. Sesuai dengan konsep Scoones (1988), migrasi mempertimbangkan aspek ruang (*space*), maka

sebagian besar responden melakukan migrasi dengan ruang (*space*) dalam lintas kabupaten Sidoarjo. Tabel 4.8. menunjukkan bahwa sebagian besar responden memilih daerah tujuan migrasi di sekitar lokasi lumpur Lapindo, yaitu lain dusun satu kelurahan sebanyak 24 orang (57,15%), disusul lain desa satu kecamatan sebanyak 16 orang (38,09%), lain kecamatan satu kabupaten sebanyak 2 orang (4,76%), dan tidak ada yang memilih di luar kabupaten Sidoarjo atau di luar provinsi. Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.8.

Tabel 4.8 Daerah Tujuan Migrasi

No	Daerah Tujuan Migrasi	Jumlah	%
1	lain dusun satu kelurahan	24	57,151%
2	lain desa satu kecamatan	11	26,19%
3	lain kecamatan satu kabupaten	7	11,60%
4	lain kabupaten satu propinsi	-	-
5	migrasi ke provinsi lain	-	-
Jumlah		42	100

Sumber: Data Penelitian, 2012

Tabel di atas menunjukkan bahwa responden cenderung bermigrasi ke daerah yang lebih dekat dengan semburan Lumpur, diantaranya pindah ke desa-desa di sebelah barat jalan Raya Porong yang masih termasuk wilayah Kecamatan Porong. Kecenderungan korban lumpur Lapindo bermigrasi ke daerah yang lebih dekat sangat beralasan, disamping agar mudah penyelesaian proses ganti rugi tanah dan bangunan dengan PT. Lapindo, tetapi juga agar tetap ada ikatan batin dengan tanah leluhur. Meskipun telah menetap di daerah tujuan, tetapi mereka masih selalu kembali ke daerah asal untuk mendengarkan informasi, bertemu dengan saudara-saudara senasib dan sekampung, dan juga untuk menjaga kalau ada perkembangan baru atau ada bantuan. Sebagaimana informasi yang peneliti peroleh dari salah seorang informan Rokhman (45 tahun) berikut ini:

“...walaupun saya sudah tinggal menetap di daerah Tulangan, tetapi saya selalu mengikuti perkembangan kelanjutan pembayaran uang ganti rugi yang belum saya terima. Kadang-kadang saya juga mengunjungi teman-teman dan saudara yang berada di daerah lain untuk membicarakan tindak lanjut nasib warga yang belum menerima ganti rugi. Selain itu, agar tidak ketinggalan informasi tentang ganti rugi tanah dan bangunan rumah saya ikut demonstrasi (unjuk rasa), kalau tidak seperti itu tuntutan kami tidak akan didengar... ” (Wawancara, 16 September 2012).

Uraian di atas menunjukkan bahwa kecenderungan warga korban lumpur Lapindo bermigrasi ke daerah yang lebih dekat ternyata tidak hanya berkaitan dengan aspek keamanan semata, tetapi juga terkait dengan aspek sosial dan ekonomi. Aspek sosial, menyangkut ikatan batin dengan tanah leluhur dan pelestarian nilai-nilai budaya. Temuan data ini sesuai dengan pendapat Mantra (1985) yang menyatakan bahwa pemilihan daerah tujuan migrasi, ada satu faktor kekuatan sentripetal, yakni suatu kekuatan yang mengikat seseorang untuk tinggal mendekati daerah asal agar bisa selalu mengenang kehidupan yang pernah dijalani dan juga mengenang makam leluhur.

Sementara itu, aspek ekonomi terkait dengan adanya uang ganti rugi yang belum tuntas atau belum diterima oleh responden hingga saat ini. Jarak daerah tujuan yang berkisar 10 – 30 km dari semburan lumpur Lapindo membuat mereka dapat berkunjung sewaktu-waktu, terutama jika ada kegiatan yang berhubungan dengan persoalan kelanjutan ganti rugi yang belum lunas.

Terkait dengan kebebasan memilih daerah tujuan migrasi, maka pengambilan keputusan daerah tujuan tidak dilakukan secara spontan. Hal ini terlihat dari temuan data tidak satu pun responden yang menjawab pengambilan keputusan secara spontan, tetapi sebagian besar responden sebanyak 28 orang (66,66%) menyatakan keputusan diambil berdasarkan jaringan sosial dengan melibatkan tetangga dan hubungan sosial lainnya, selanjutnya yang menyatakan pengambilan keputusan berdasarkan berunding dengan anggota keluarga sebanyak 14 orang (33,34 %). Selengkapnya dapat dilihat pada tabel 4.9.

Tabel 4.9 Pengambilan Keputusan Daerah Tujuan Migrasi

No	Keputusan Pemilihan Daerah Tujuan Migrasi	Jumlah	%
1	Menggunakan jaringan sosial	28	66,66%
2	Dilakukan secara spontan	-	-
3	Berunding dengan keluarga	14	33,34%
Jumlah		42	100

Sumber: Data Penelitian, 2012

Setiap orang di dalam menjalani kehidupannya haruslah memutuskan hal-hal apa saja yang perlu dilakukannya. Temuan data penelitian ini menunjukkan bahwa dalam pengambilan keputusan pemilihan daerah tujuan migrasi sebagian besar dilakukan dengan menggunakan jejaring sosial. Sebagian besar responden menyatakan bahwa pemilihan daerah tujuan migrasi disepakati secara bersama-sama oleh seluruh anggota masyarakat yang ada di daerah asal. Sebagaimana informasi yang peneliti peroleh dari H. Suanrto (50 tahun) yang merupakan ketua Paguyuban Pagar Rekontrak berikut ini :

“kami memilih daerah tujuan migrasi disepular lingkup kabupaten Sidoarjo yang lokasinya tidak terlalu jauh dari luapan Lumpur, yaitu di Desa Macan Mati kecamatan Porong. Kami memilih daerah tersebut agar seluruh warga masyarakat Renokenongo yang dulu di daerah asal sudah saling berkenalan tidak bercerai-berai tetapi dapat dipindahkan secara bersamaan sehingga tatanan sosial, nilai-nilai sosial yang telah terbangun di desa asal tidak mengalami proses pemudaran (Wawancara 02 Desember, 2012).

Uraian tersebut menunjukkan bahwa pemilihan daerah tujuan di lakukan secara kelompok kemasyarakatan dan atas dasar sukarela, tidak adapaksaan dari pemerintah atau lembaga lain. Proses perpindahan mereka murni dilakukan sendiri oleh kelompok yang tergabung dalam Paguyuban Pagar Rekontrak. Proses perpindahan yang dilakukan oleh kelompok yang tergabung dalam Pagarrekontrak ini dikenal dengan “Bedol Desa”. Ketentuan ini dirumuskan sesuai dengan keinginan masyarakat setempat agar lokasi baru tidak dimasuki oleh penduduk pendatang. Dengan demikian, sanak keluarga dan kerabat mereka yang dulunya

tinggal di desa Renokenongo dapat berkumpul kembali, sehingga kehidupan sosial budaya masyarakat dapat dihidupkan dan diteruskan kembali. Ini juga membuktikan jika mentalitas petani masih tetap dilestarikan oleh petani korban lumpur Lapindo di daerah tujuan dengan adanya perasaan aman dan tentram sepanjang kebutuhan hidupnya terfenuhi (susbsisten) dan tradisi-tradisi leluhur tetap dilestarikan.

4.4 Pola Kehidupan Sosial Ekonomi Migran di Daerah Tujuan

Dalam pembahasan berikut akan memberikan gambaran pola kehidupan sosial ekonomi migran petani korban lumpur Lapindo di daerah tujuan. Untuk melihat pola kehidupan ekonomi migran petani korban lumpur Lapindo penulis mengacu pada pendapat dari Soeratmo (dalam Dahriani, 1995) yang mengemukakan kehidupan sosial ekonomi rumahtangga diukur berdasarkan; pendapatan, keadaan tempat tinggal, dan kesehatan.

4.4.1. Pendapatan

Berbagai jenis aktivitas manusia tentunya mengharapkan imbalan, apalagi yang bernilai ekonomi. Imbalan yang dimaksud adalah pendapatan yang diperoleh di daerah tujuan migrasi. Ukuran pendapatan di daerah tujuan penting diketahui untuk mendeskripsikan apakah pendapatan responden mengalami peningkatan atau penurunan dibandingkan dengan kehidupan mereka sebelum adanya lumur Lapindo. Untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel 4.10.

Tabel 4.10 Distribusi Responden Berdasarkan Jumlah
Pendapatan di Daerah Tujuan

No	Penghasilan Responden	Jumlah	%
1	< Rp. 500.000	3	7,14
2	Rp. 500.000 – Rp. 1000.000	32	76,19
3	Rp. 1000.000 – Rp. 2000.000	7	16,67
4	> Rp. 2000.000	-	
Jumlah		42	100

Sumber : Data Primer, 2012

Data di atas menunjukkan bahwa rata-rata pendapatan keluarga responden di daerah tujuan berikisar antara Rp. 500.000 – Rp. 1000.00, yaitu sebanyak 32 orang (76,19%), selanjutnya yang berpenghasilan Rp. 1000.000 – Rp. 2000.000 sebanyak 7 orang (16,67%), dan berpenghasilan < Rp. 500.000 sebanyak 3 orang (7,14%). Dari gambaran tersebut merefleksikan kehidupan responden di daerah tujuan cenderung memiliki penghasilan yang kecil. Fenomena ini seperti yang detegaskan Widiyantoko, yang berasal dari Desa Macan Mati.

”...dulu saya selain bekerja sebagai petani di sawah milik sendiri, saya dibantu istri dan anak-anak membuka kos-kosan dan berjualan karena di depan rumah saya waktu itu ada pabrik baja, namun sekarang di daerah sini tidak ada usaha yang dapat saya lakukan....sehingga saya hanya mengandalkan pendapatan dari anak .. (Wawancara, 16 September 2012).

Uraian di atas menunjukkan bahwa pendapatan responden setelah berada di daerah tujuan lebih rendah dibanding sebelum munculnya tragedi lumpur Lapindo. Dengan penghasilan seperti ini menurut responden mereka hanya bisa hidup seadanya, apalagi jika dikaitkan dengan jumlah tanggungan keluarga. terkadang terpaksa meminjam kepada tetangga atau mengutang di kios. Pada tabel 4.3 dapat diketahui bahwa sebagian besar responden memiliki tanggungan keluarga antara 4- 6 jiwa yaitu sebanyak 28 orang (66,67%), dan 14 orang (33,33%) memiliki tanggungan antara 1 – 3 orang. Minimnya pendapatan responden, sementara jumlah tanggungan yang banyak, maka diperkirakan tidak akan dapat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga responden, karena itu mereka melakukan meminjam uang kepada saudara apabila kekurangan uang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tidak terpenuhi.

Suatu permasalahan yang muncul pada masyarakat petani korban Lapindo di daerah tujuan adanya fenomena sebagian besar dari petani yang tidak memiliki suatu ketrampilan untuk membuka usaha baru. Dari sebagaian besar masyarakat tani di daerah tujuan banyak yang menekuni usaha berjualan kecil-kecilan, seperti jual makanan kue, jajanan untuk anak-anak, dan sebagian ada yang sebagai penjual asongan di sepanjang jalan raya porong. Usaha -usaha tersebut yang terutama di dominasi oleh kaum Ibu, utamanya untuk menyambung kebutuhan

hidup sehari-hari keluarga, sementara uang ganti rugi yang mereka terima sudah semakin berkurang, bahkan ada yang penyelesaian ganti rugi tersebut belum sepenuhnya terealisasi. Umumnya petani korban Lapindo di daerah tujuan ini bisa untuk kehidupan sehari-hari bagi keluarganya sudah sangat bersyukur.

4.3.2. Keadaan Tempat Tinggal

Tempat tinggal adalah tempat berlindung dari pengaruh cuaca di luar maupun sebagai tempat berkumpulnya manusia atau keluarga dalam kehidupan sehari-hari, sehingga tempat tinggal merupakan salah satu kebutuhan pokok bagi kehidupan manusia. Untuk itulah, tidak mengherankan uang ganti rugi yang diterima responden digunakan untuk membeli rumah. Status kepemilikan rumah tempat tinggal responden di daerah tujuan dapat dilihat pada tabel 4.11.

Tabel 4.11 Status Tempat Tinggal Responden di Daerah Tujuan

No	Status Tempat Tinggal	Jumlah	%
1	Warisan	-	-
2	Rumah sendiri	42	100
3	Kontrakan	-	-
Jumlah		42	100

Sumber: Hasil Penelitian, 2012

Data di atas menunjukkan bahwa status kepemilikan tempat tinggal responden di daerah tujuan, yaitu 100% status pemilikan rumah adalah milik sendiri. Berdasarkan tabel di atas dapat dikatakan bahwa responden telah memiliki kemampuan yang cukup dalam hal kepemilikan tempat tinggal. Namun untuk lebih lengkapnya dari status kepemilikan rumah tersebut perlu dijelaskan pula bagaimana jenis rumah yang mereka tinggali tersebut, apakah rumah kayu, rumah permanen dari batu, setengah batu atau hanya berupa kios saja. Untuk lebih jelasnya jenis rumah migrant petani korban lumpur Lapindo di daerah tujuan dapat dilihat pada tabel 4.12.

Tabel 4.12 Jenis Bangunan Rumah Responden
di Daerah Tujuan

No	Jenis Bangunan Rumah	Jumlah	%
1	Rumah kayu (tepas)	2	4,76
2	Rumah permanen dari batu	35	83,33
3	Setengah batu	5	11,91
Jumlah		42	100

Sumber: Hasil Penelitian, 2012

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa rumah tinggal responden di daerah tujuan sebagian besar mempunyai bentuk rumah permanen dari batu yaitu sebanyak 35 orang (83,33%), dan yang mempunyai bentuk rumah setengah batu sebanyak 5 orang (11,91%), dan 2 orang responden (4,76%) masih memiliki rumah yang terbuat dari kayu (tepas). Data ini menunjukkan bahwa dari segi kepemilikan dan bentuk rumah di daerah tujuan sudah bagus. Dari hasil survei peneliti ke daerah tujuan menunjukkan bahwa bangunan rumah responden jauh lebih bagus dibandingkan dengan penduduk lokal. Hal ini juga diakui oleh salah seorang responden Bapak Untung (80 tahun) ketika dilakukan wawancara:

” kalau rumah yang sekarang memang jauh lebih baik lah...dari pad umh saya dulu yang sudah tertan lumpur Lapindo. Bangunan rumah yang dulu masih setengah batu...yang sekarang lumayan sudah permanen. Meskipun rumah saya sudah permanen tapi saya merasa lebih nyaman di daerah asal karena disana saya memiliki sawah yang dapat ditanami padi dan palawijaya (Wawancara, 02 Desember 2012).

Uraian di atas menunjukkan bahwa prioritas pemilikan rumah memang menjadi hal yang utama bagi para korban lumpur Lapindo. Dari hasil wawancara juga diketahui bahwa uang ganti rugi yang diperoleh dari PT. Lapindo dipergunakan untuk membeli rumah. Hanya sebagian responden yang menyatakan digunakan untuk menjadi modal usaha karena di daerah tujuan tampaknya sulit untuk membuka usaha baru, seperti berjualan.

4.3.4. Pendidikan Anak

Besar kecilnya jumlah anak yang menjadi tanggungan bagi kepala keluarga terutama dalam memenuhi segala kebutuhan sang anak. Kebutuhan bagi anak selain sandang pangan juga kebutuhan untuk bersekolah adalah hal yang paling pokok bagi bekal masa depan anak. Selengkapnya jumlah tanggungan biaya untuk anak sekolah dapat dilihat dalam Tabel 4.13.

Tabel 4.13. Distribusi Responden Menurut Anak Yang Bersekolah

No	Tanggungan Anak yang bersekolah	Jumlah	%
1	Ada	34	80,95
2	Tidak ada	8	19,05
Jumlah		42	100

Sumber: Hasil Penelitian, 2012

Tabel di atas menunjukkan bahwa responden yang mempunyai anak yang bersekolah yaitu 34 orang responden (80,95%), ini merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan status sosial khususnya bagi masa depan anak, sedangkan 8 responden (19,05%) tidak mempunyai anak yang bersekolah. Para responden yang tidak memiliki anak yang bersekolah disebabkan anak-anak mereka putus sekolah karena tidak mampu membiayai kebutuhan pendidikan. Hal ini dipertegas dari wawancara dengan Bapak Suanrto Ketua Paguyuban Renokenongo menyatakan:

”akhir-akhir ini jumlah anak-anak yang tidak bersekolah cukup banyak di desa ini. Anak-anak tersebut kebanyakan putus sekolah di tingkat SLTP karena kesulitan ekonomi orang tua untuk membayar biaya sekolah yang semakin meningkat. Anak-anak putus sekolah sebenarnya memiliki keinginan untuk bekerja di pabrik yang ada, tetapi karena mereka tidak memiliki ijazah dan keahlian sehingga pihak perusahaan tidak menerima. Padahal sebenarnya, kalau mereka diberikan pelatihan dan diperbolehkan mengerjakan di rumah sendiri dapat membantu pempadatan keluarga dan sekaligus membiayai kebutuhan sekolah...” (Wawancara, 02 Desember 2012).

Uraian di atas menunjukkan bahwa kondisi ekonomi keluarga petani korban Lapindo di daerah tujuan sebagian besar masih memprihatinkan, sehingga menyebabkan anak-anak mereka sebagian harus berhenti (putus sekolah) dan tidak bisa melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi. Gejala yang muncul sebagian besar terjadi pada peserta didik tingkat SMP yang tidak melanjutkan ke jenjang pendidikan SLTA, namun juga ada yang hanya bersekolah sampai tingkat SD saja. Gejala adanya anak putus sekolah akibat keterbatasan ekonomi pada keluarga petani korban Lapindo di daerah tujuan tidak dapat dibiarkan secara berlarut-larut. Oleh karena itu perlu dilakukan pemberdayaan anak-anak putus sekolah, misalnya pendidikan keterampilan hidup (*Life Skill*).

4.4.5. Hubungan Sosial di Daerah Tujuan

Kehidupan ketetangaan dan kekeluargaan yang telah terbangun dan menjadi kebiasaan berperilaku masyarakat yang ada di sekitar semburan lumpur mengalami perubahan yang sangat mendasar. Kebiasaan, norma dan perilaku masyarakat yang awalnya cukup kondusif bagi terciptanya kedamaian serta ketentraman masyarakat nampaknya sudah mulai berubah. Hubungan ketetangaan yang cukup intens dimana masyarakat sudah mengenal satu dengan lainnya, maupun hubungan kekeluargaan yang telah terbangun demikian lamanya, harus terpisah secara fisik. Kerenggangan dan ketegangan serta kecurigaan diantara warga masyarakat mulai bersemi dalam lingkungan masyarakat korban lumpur Lapindo. Bahkan konflik, ketidakpercayaan serta kekerasan, nampaknya sedikit mewarnai bentuk dan sikap masyarakat terdampak (Sukamto, 2012).

Kerenggangan dan ketegangan serta kecurigaan masyarakat yang sebenarnya jarang terjadi ataupun tidak pernah terjadi selama ini, nampaknya menjadi realitas baru dalam masyarakat korban lumpur Lapindo. Disamping itu, mereka juga berintegrasi dan berinteraksi dengan para penduduk di daerah setempat dan juga dengan sanak keluarga, tetangga yang dulu sudah saling kenal di daerah asal dan terutama bagi pengurus kelompok. Selengkapnya kunjungan responden pada sanak keluarga dapat dilihat pada tabel 4.14.

Tabel 4.14 Distribusi Responden Menurut Kunjungan Pada Keluarga

No	Kunjungan Pada Keluarga	Jumlah	%
1	Ya	39	92,86
2	Tidak	3	7,14
Jumlah		42	100

Sumber: Hasil Penelitian, 2012

Tabel di atas, menunjukkan bahwa kunjungan pada tempat sanak keluarga menunjukkan ada 39 responden (92,86%) saling berkunjung ke tempat sanak keluarga, sedangkan hanya 3 orang (7,14%) responden yang menyatakan tidak pernah berkunjung pada sanak keluarga yang sama-sama menjadi korban lumpur Lapindo. Kunjungan ke sanak keluarga hampir tidak pernah, kemungkinan disebabkan oleh jarak tempat tinggal responden dan tempat tinggal sanak keluarga yang berjauhan. Sementara itu, responden yang sering melakukan kunjungan ke pengurus kelompok karena urusan masalah ganti rugi tanah yang belum selesai. Meskipun kunjungan secara tatap muka sudah jarang dilakukan, tetapi para responden memiliki cara lain yaitu berkomunikasi lewat handphone. Komunikasi melalui media teknologi sudah dimungkinkan karena hampir setiap orang sudah memiliki telephone selular mulai dari golongan anak-anak sampai orang tua.

Selain itu, kecenderungan terjadinya konflik diantara sesama korban lumpur Lapindo di daerah tujuan juga sering mewarnai kehidupan mereka saat ini. Kecenderungan ini lebih disebabkan oleh kebijakan yang sesat dalam penyelesaian ganti rugi tanah yang ditawarkan pemerintah. Untuk mengganti rugi tanah dan bangunan korban Lumpur Lapindo dilakukan melalui tiga jenis, cash and cary, pembayaran 80 %, dan secara bertahap. Perbedaan penyelesaian ganti rugi ini kemudian menyebabkan masyarakat korban lumpur dalam polarisasi yang sangat tajam, sehingga diantara mereka muncul beberapa kelompok dan diantaranya selalu mencurigai satu sama lain. Kecurigaan diperkuat lagi dengan adanya kecemburuan terhadap satu kelompok yang kebetulan sudah memperoleh ganti rugi. Selengkapnya intensitas konflik dapat dilihat pada tabel 4.15.

Tabel 4.15 Distribusi Responden Menurut Intensitas Terjadinya Konflik di Daerah Tujuan

No	Intensitas terjadinya konflik	Jumlah	%
1	Sering	27	64,28
2	Jarang	10	23,81
3	Tidak Pernah	5	11,91
Jumlah		42	100

Sumber: Hasil Penelitian, 2012

Tabel diatas menunjukkan bahwa intensitas terjadinya konflik antar sesama petani korban lumpur Lapindo di daerah tujuan, yaitu sebanyak 27 orang responden (64,28%) menyatakan sering terjadi, 10 orang (23,81%) menyatakan jarang terjadi konflik, dan hanya 5 orang responden (11,91%) yang menyatakan tidak pernah terjadi konflik. Temuan data ini didukung oleh pemberitaan di media massa yang melaporkan bahwa petani dan warga korban lumpur Lapindo di daerah tujuan masih rawan konflik, baik antara sesama korban lumpur Lapindo maupun dengan pihak pemerintah. Terjadinya konflik sesama petani korban lumpur Lapindo menyusul menguatnya polarisasi diantara mereka yang menuntut ganti rugi secara tunai dengan mereka yang menerima tawaran rumah yang disediakan PT. Lapindo Jaya di Sukodono Sidoarjo. Warga korban lumpur Lapindo yang menerima tawaran rumah langsung diberi ganti rugi kekurangan 80% dibayar tunai, sedangkan mereka yang meminta ganti rugi uang tunai masih diberi janji sehingga mereka sangat marah (Kompas, Januari 2008).

Sementara itu, hubungan antara masyarakat lainnya di sekitar pemukiman memerlukan proses interaksi dan adaptasi antar para penduduk dalam satu lingkungan tempat bermukim. Interaksi yang baik akan memunculkan kerjasama dan keterlibatan dalam kegiatan kemasyarakatan. Selengkapanya keterlibatan responden dalam kegiatan kemasyarakatan di lingkungan tempat tinggal di daerah tujuan dapat dilihat pada tabel 4.16.

Tabel 4.16 Distribusi Responden Menurut Keterlibatan Dalam Kegiatan Kemasyarakatan di Lingkungan Tempat Tinggal

No	Keterlibatan dalam Kegiatan Kemasyarakatan	Jumlah	%
1	Ya	35	83,33
2	Kadang-kadang	7	16,67
3	Tidak	-	-
Jumlah		42	100

Sumber: Hasil Penelitian, 2012

Dari tabel di atas menunjukkan keterlibatan responden dalam kegiatan kemasyarakatan di lingkungan tempat tinggal mereka, misalnya kegiatan gotong royong atau kegiatan kemasyarakatan lainnya. Responden yang menjawab sering terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan sebanyak 35 orang (83,33%), 7 orang (16,67%) yang menyatakan kadang-kadang mengikuti, sedangkan yang tidak pernah mengikuti tidak ada. Hal ini terlihat pada saat kegiatan gotong royong, seperti membangun rumah. Keterlibatan warga dalam kegiatan gotong royong dapat dilihat dari terbentuk perkampungan baru di lokasi pengungsian Desa Macan Mati yang semula masih bangunan rumah-rumah kopel seadanya, tetapi saat ini sudah menjadi rumah permanen. Untuk membangun rumah, masyarakat melakukannya dengan cara gotong royong, seperti yang dijelaskan oleh Soedarta.

“... rumah kopel yang ditempati oleh warga pengungsi merupakan hasil kerja bersama secara gotong royong dengan tetangga dan kerabat yang ada di lokasi pengungsian. Ada beberapa bahan materil yang diperoleh dari bantuan pemerintah Kabupaten Sidoarjo dan sebagian dari bantuan swadaya masyarakat yang masih peduli dengan kelanjutan nasib pengungsi korban Lapindo...” (Wawancara, 16 September 2012).

Kegiatan sosial kemasyarakatan tampak pula dalam upacara dan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat. Tradisi ini dilakukan dengan cara mengundang langsung kerabat dan tetangga, sementara untuk pihak lain yang dianggap lebih dekat dan lebih dihormati dilakukan dengan cara mengirimkan makanan dalam bentuk rantang yang diantar sendiri oleh tuan rumah. Pada dasarnya undangan dengan cara pengiriman makanan ini disertai harapan agar mereka memberikan

hadiah atau kado yang lebih besar jumlahnya daripada undangan biasa. Bagi mereka, undangan yang dilakukan dengan cara ini sudah sama-sama dimaklumi, yakni merupakan keharusan untuk memberikan kado, biasanya berupa uang, dengan jumlah yang lebih banyak atau setara dengan yang mereka terima pada pesta yang pernah diselenggarakan sendiri. Hasil penelitian ini mendukung pendapat Koentjaraningrat (1974), dalam Kutanegara (2002) yang menjelaskan bahwa hubungan resiprositas sangat kuat di pedesaan Jawa. Di daerah pedesaan Jawa, suatu rumah tangga pertama-tama harus menjaga hubungan yang baik dengan tetangga sekitarnya, kemudian dengan keluarga-keluarga lain sedukuh dan baru kemudian dengan keluarga lain yang tinggal di dukuh-dukuh lain. Penekanan hubungan baik dengan tetangga yang harus dipupuk pertama kali menandakan bahwa peran dan fungsi tetangga sangat penting bagi masyarakat pedesaan. Jalinan hubungan baik itu bahkan harus mengalahkan hubungan baik dengan kerabat yang berada di tempat yang lebih jauh.

4.5 Kesempatan Kerja Migran Petani Di Daerah Tujuan

Setelah beberapa lama berada di daerah tujuan, para responden tentunya berusaha mendapatkan pekerjaan, baik dari usaha sendiri untuk mencari maupun bantuan sanak keluarga. Bagi responden yang sudah memiliki pekerjaan tetap sewaktu belum pindah, tidak kesulitan mencari pekerjaan baru, tetapi bagi responden yang bekerja sebagai petani harus berjuang untuk mencari pekerjaan sesuai dengan lapangan pekerjaan yang terbuka di daerah tujuan. Mereka mendapatkan pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan keterampilan yang mereka miliki, sebagaimana kita ketahui bahwa pada umumnya petani mempunyai latar belakang pendidikan, keterampilan maupun keahlian yang tergolong rendah dan terbatas sehingga hal ini menimbulkan permasalahan dalam penciptaan kesempatan kerja baru. Berbeda dengan mereka korban lumpur Lapindo yang mempunyai pekerjaan di bidang non pertanian sehingga cukup memikirkan tempat tinggal, sedangkan lahan pekerjaan masih tetap seperti semula sebelum tempat tinggalnya terkena lumpur Lapindo.

Meskipun fakta hukum menegaskan bahwa PT Lapindo tidak bisa disalahkan dalam kasus bencana lumpur ini, tetapi komitmen perusahaan untuk ikut menanggung dan membantu dalam menanggulangi bencana semburan lumpur sangat tinggi. Sistem pembayaran yang ditawarkan kepada para responden ada dua, yaitu cash and carry atau diberikan secara bertahap. Dalam kenyataan, sebagian besar memperoleh ganti rugi dengan sistem bertahap dan pencairannya tidaklah semudah yang dibayangkan, tetapi untuk memperolehnya perlu perjalanan yang panjang dan sampai saat ini masih ada warga korban lumpur Lapindo yang belum menerima pelunasan pembayaran uang ganti rugi.

Adanya ganti rugi yang diberikan PT Lapindo sebenarnya dapat dipergunakan oleh responden untuk membeli lahan persawahan di daerah tujuan atau ditempat yang lain. Namun, para responden menyatakan tidak menggunakan uang ganti rugi tersebut untuk membeli lahan pertanian karena lahan pertanian di sekitar daerah tujuan sulit dicari, meskipun ada lahan sawah ada yang dijual tetapi tidak dapat dibeli karena harga lahan sawah sangat mahal. Sementara para responden masih mengutamakan untuk pembelian rumah. Temuan data menunjukkan bahwa dari 42 orang responden, hanya 2 orang (4,76%) yang menyisahkan uang ganti rugi tanah dan bangunan rumah untuk keperluan membeli sawah, sedangkan selebihnya responden menggunakan untuk keperluan membeli rumah sebanyak 40 orang (95,24%). Selengkapnya peruntukkan uang ganti rugi tanah dan bangunan dapat dilihat pada tabel 4.17.

Tabel 4.17 Distribusi Responden Berdasarkan Penggunaan Uang Ganti Rugi

No	Penggunaan Uang Ganti Rugi	Jumlah	%
1	Membeli rumah	40	95,24
2	Membeli sawah	2	4,76
3	Modal usaha	-	-
Jumlah		42	100

Sumber: Data penelitian 2012

Tabel di atas menunjukkan bahwa hanya 2 orang (4,76%) responden yang membelikan tanah (lahan sawah) dan selebihnya hanya dipergunakan untuk membangun rumah di daerah tujuan. Data ini sekaligus mendeskripsikan bahwa para migran petani korban lumpur Lapindo tidak memiliki pekerjaan utama sebagai petani lagi. Selengkapnya jenis pekerjaan responden saat ini di daerah tujuan dapat dilihat pada tabel 4.18.

Tabel 4.18 Distribusi Responden Berdasarkan Pekerjaan di Daerah Tujuan

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	%
1	Petani	2	4,65
2	Buruh tani	5	11,90
3	Pedagang	8	19,04
4	Tukang Becak	4	9,52
5	Tukang Ojek	7	16,66
6	Buruh/karyawan	13	30,95
7	Ibu rumah tangga	3	7,14
Jumlah		42	100

Sumber: Data penelitian 2012

Dari hasil data yang telah diperoleh dari responden, mereka yang tidak lagi bekerja sebagai petani, hanya 2 orang (4,65%) yang masih bekerja sebagai petani dan 5 orang bekerja sebagai buruh tani (11,90%). Sedangkan mayoritas responden saat ini bekerja sebagai buruh/karyawan di pabrik sebanyak 13 orang (30,95%), 7 orang (16,66%) sebagai tukang ojek, 4 orang (9,52%) tukang becak, 8 orang (19,04%) sebagai pedagang, dan 3 orang (7,14%) sebagai ibu rumah tangga. Dari data tersebut juga menunjukkan bahwa mereka yang bekerja sebagai buruh nampaknya masa menganggur mereka relatif lama. Kesempatan kerja di kota untuk para migran dari desa umumnya berada pada lapangan kerja sektor informal, karena tingkat kemampuan yang dimiliki oleh mereka sangat minim, di samping itu persaingan dalam lapangan kerja di sektor formal di kota cukup ketat sehingga mereka hanya bekerja pada jenis pekerjaan yang hanya mengandalkan fisik semata. Ada dua alasan mengapa para migran memilih bekerja di sektor informal, pertama oleh karena waktu bekerja di sektor informal bersifat luwes

sehingga mereka dapat mencari pekerjaan yang lainnya. Seperti halnya penjual pedagang informal, yang hanya bekerja pada sore hingga malam hari, jadi pagi harinya mereka dapat bekerja di tempat lain.

Selama hidup di daerah tujuan sebagian besar ekonomi keluarga responden memburuk, sementara biaya hidup semakin hari semakin banyak. Jika hanya mengandalkan pendapatan suami sebagai kepala keluarga, maka kebutuhan keluarga tidak terpenuhi. Oleh karena itu, pemanfaatan tenaga kerja keluarga merupakan suatu kebutuhan yang tidak dapat ditawar-tawar lagi. Bila mereka tidak ikut bekerja, kebutuhan rumahtangga sulit dipenuhi. Upaya ini sering sekali menemui hambatan karena tidak tersediannya peluang kerja sehingga mereka terpaksa melakukan pekerjaan apa saja, walaupun penghasilan rendah. Jenis pekerjaan tidak menjadi masalah, tetapi yang terpenting memperoleh penghasilan. Untuk mengatasi kebutuhan pokok keluarga yang tidak bisa ditunda, para migran petani perempuan mulai ikut bekerja membantu suami. Sutinah (43 tahun), setiap pagi berjualan lontong hingga siang hari dan setelah pulang juga membantu suaminya menjaga warung kecil-kecilan. Warung yang dibukanya menjual berbagai macam barang keperluan sehari-hari, seperti rokok, sabun mandi, makanan anak-anak. Pendapatan yang diperoleh dari berjualan lontong dan buka warung, menjadi sumber utama dalam memenuhi kebutuhan keluarganya saat ini.

Sebenarnya Sutinah memiliki keinginan untuk membuka kembali usaha wiraswasta yang telah dikembangkannya sebelum munculnya kasus lumpur Lapindo, tetapi keinginan tersebut tidak dapat diwujudkan karena mereka tidak memiliki modal. Untuk mendapatkan modal usaha, mereka pernah mengajukan pinjaman modal usaha kepada bank dengan memberikan jaminan surat tanah dan bangunan rumah, tetapi pihak bank menolaknya karena surat tanah tersebut tidak dapat dijadikan sebagai jaminan. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun sebenarnya migran korban lumpur Lapindo ini menghadapi kehidupan sosial ekonomi yang serba sulit, ternyata mereka masih memiliki harapan untuk mengubah kehidupan mereka seperti semula dengan membangun usaha yang pernah mereka jalankan sebelumnya.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Dari hasil analisis yang dilakukan terhadap data penelitian, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

1. Motif migrasi yang dilakukan petani korban lumpur Lapindo bukan faktor ekonomi tetapi keinginan untuk menyelamatkan diri dan rasa aman, pemilihan daerah tujuan migrasi tidak dilakukan ke daerah perkotaan, namun cenderung daerah yang lebih dekat dengan lokasi semburan lumpur, kerana disamping dapat mempermudah penyelesaian proses ganti rugi tanah dan bangunan yang belum tuntas, tetapi juga keinginan untuk melestarikan nilai-nilai budaya dan ikatan batin dengan tanah leluhur.
2. Secara umum pola kehidupan sosial ekonomi keluarga petani korban lumpur Lapindo di daerah tujuan mengalami perubahan, baik aspek pendapatan, pendidikan, dan perumahan. Diantara ketiga aspek tersebut, hanya aspek perumahan yang menunjukkan terjadinya perubahan kearah yang lebih baik, sedangkan pendapatan dan pendidikan cenderung mengalami penurunan. Aktivitas sosial budaya tidak mengalami perubahan, tetapi ada kecendrungan munculnya konflik diantara sesama migran akibat pilihan penyelesaian ganti rugi tanah yang berbeda sehingga membentuk polarisasi dalam masyarakat dan akhirnya berujung pada saling curiga dan menghasilkan konflik sosial.
3. Kesempatan kerja di daerah tujuan ternyata tidak menyediakan banyak pilihan, karena itu mereka harus berusaha mendapatkan pekerjaan, tetapi latar belakang pendidikan, keterampilan dan keahlian yang dimiliki cukup rendah menyulitkan untuk memperoleh pekerjaan sehingga mereka tidak menggantungkan kehidupan sebagai petani, tetapi banyak diantara mereka yang beralih pekerjaan di sektor informal, seperti jual makanan kue, jajanan untuk anak-anak, tukang ojeng, supir becak, dan buruh/karyawan.

5.2 Saran

Berdasarkan gambaran pola kehidupan migran petani di daerah tujuan, menunjukkan bahwa kehidupan rumahtangga mereka sebenarnya tidaklah nyaman bahkan masih cukup memprihatinkan. Berdasarkan hasil penelitian tersebut, maka dapat disampaikan beberapa saran:

1. Memberikan bantuan modal usaha bagi korban lumpur Lapindo dengan cara memberikan bantuan yang tepat sarasan dan produktif, sehingga dapat bermanfaat untuk pengembangan usaha yang sesuai kondisi di daerah tujuan.
2. Merealisasikan keinginan migran petani korban lumpur Lapindo untuk memberikan pelatihan keterampilan kerja kepada anak-anak yang putus sekolah di daerah tujuan yang jumlahnya cukup banyak.
3. Melakukan penelitian lanjutan dengan sifat saling melengkapi dan mungkin berguna bagi pemerintah dalam membuat kebijakan yang lebih berpihak pada korban lumpur Lapindo.

DAFTAR PUSTAKA

- Akbar, Ali, Azhar. 2007. *Konspirasi di Balik Lumpur Lapindo: Dari Aktor Hingga Strategi Kotor*, Galang Press, Yogyakarta.
- Abdullah, Irwan. 2006. Dialektika Natur, Kultur dan Struktur: Analisis Konteks, Proses dan Ranah Dalam Konstruksi Bencana, pidato pengukuhan sebagai Guru Besar Antropologi pada Fakultas Ilmu Budaya, UGM.
- Daulay, Pardamean dan Mamik Sumarmi, 2010. Mekanisme Survival Rumah Tangga Korban Lumpur Lapindo, *Jurnal Organisasi dan Manajemen*, Vol 2 September 2010, Jakarta, Universitas Terbuka.
- Dahriani. 1995. *Potret Kehidupan Pedagang Kaki Lima di Pantai Losari*, Makassar: Universitas Hasanuddin.
- Effendi, S. 1986. Mobilitas Angkatan Kerja Indonesia ke Timur Tengah: Studi Kasus Propinsi Jawa Tengah, DIY, Propinsi Jawa Barat (Laporan Akhir, Buku II). Kerjasama Kantor Menteri Negara Kependudukan dan Lingkungan Hidup dengan PPK-UGM.
- Fuller, Gary (eds). 1980. *Urbanization in Developing Nations*. Center for Policy Studies. One Dag Hammarskjod Plaza, New York ; USA.
- Fukuyama, Francis. 2005. *Guncangan Besar: Kodrat Manusia dan Tata Sosial Baru*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Giddens, A. 1995. *The Constitution of Society: Outline of The Theory of Structuration*, Polity Press, Cambridge.
- Goma, Johan Naomi. 1993. Mobilitas Tenaga Kerja Flores Timur ke Sabah Malaysia dan Pengaruhnya terhadap Daerah Asal, Tesis (tidak diterbitkan) Program Pascasarjana, Universitas Gajah Mada, Yogyakarta.
- Gurr, T.R. 1970. *When Man Rebel*. Princeton University Press, Princeton.
- Haralambos, M. and M.Horlborn. 2000. *Sociology: Themes and Perspective*. (5th edition). Harper Collins Publisher Ltd., London.
- Hugo, G.J. 1995. *Illegal International Migration in Asia* in *The Cambridge Survey of World Migration*, R.Cohen (ed.). Cambridge University Press.
- Hugo, G.J. 1995b. *Environmental Concern and International Migration*, in *International Migration Review* Vol 30:105-131.

- Ilah, Saiful. 2006. Perkembangan Dampak Luapan Lumpur di Kecamatan Porong dan Sekitarnya, dalam Diskusi Panel Ikatan Alumni Ekonomi Unair, Surabaya.
- Kanto, Sanggar, 2006, Mobilitas Penduduk dan Perubahan Sosial: Kasus migrasi sirkuler pada Daerah Bencana. Malang: Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya.
- Lee, Everett, S. 1976. Suatu Teori Migrasi. Seri Terjemahan No 3. Pusat Penelitian Studi Kependudukan Universitas Gajah Mada, Yogyakarta
- Landsberger, A., Henry dan Alexandrov, G.Yu. 1984. Pergolakan Petani dan Perubahan Sosial. Hasil riset dengan International Institute for Labour Studies. YIIS-CV. Rajawali, Jakarta.
- Mantra , IB, 2000. Studi Migrasi Penduduk Pada Daerah Bencana, Makalah disampaikan pada Dies Natalis Fakultas Geografi UGM, Agustus,2000.
- Miles, Matthew B. dan A. Michael Huberman. 1992.. *Analisis Data Kualitatif, Buku Sumber Tentang Metode-Metode Baru*. Terjemahan dari Analyzing Qualitative Data : A Source Book for New Methods. UI Press, Jakarta.
- Moleong, Lexy J. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosdakarya, Bandung.
- Muhammad, Mulyadi. 2008. *Lumpur Lapindo: Melihat Bencana Alam dalam Bingkai Budaya*. <http://luckymulyadisejarah.wordpress>, diakses 4 Februari 2009.
- Muhammad, Halid. 2006. "Pemerintah Dituntut Serius dalam Mengelola Bencana Ekologis"<http://walhi.or.id/kampanye/bencana/060623-benceko-sp/>, diakses 7 Pebruari 2008.
- Marzali, A. 1993. *Konsep Peisan dan Kajian Masyarakat Pedesaan di Indoensia dalam Jurnal Antropologi* N0. 54. FISIP UI.
- Noveria, Mita. 2007. *Bencana Alam Dari Sisi Kependudukan Penyebab dan Dampaknya*, Jurnal Masyarakat Indonesia, edisi XXXIII, No. 2, 2007.
- Naim, Mochtar. 1979. Merantau, Pola Migrasi Suku Minangkabau. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.
- Popkhin, Samuel, L, 1986, *Petani Rasional*, Yayasan Padamu Negeri, Jakarta.
- Qomariyah. 2000. Pemanfaatan Remiten Migran Sirkuler Internasional di Desa Pagak, Kabupaten Malang. Tesis (tidak diterbitkan) Pasca Sarjana Universitas Airlangga, Surabaya.

- Rochiyati Murni. 1998. Alokasi Remitan dan Faktor-faktor yang Dipertimbangkan dalam Pembentukan Peluang Usaha Rumah tangga Tani Migran Sirkuler (Studi kasus di Desa Kalirejo, Kecamatan Sukorejo, Kabupaten Pasuruan, Jawa timur). Tesis Pascasarjana Unair, Surabaya.
- Susilo, Singgih. 2002. Remitensi dan Kesejahteraan Keluarga (Hubungan Antara Besarnya Remitensi dan Tingkat Kesejahteraan Keluarga di Daerah Asal, Suatu Kasus TKI di Kecamatan Rejotangan Kabupaten Tulungagung). Tesis Pasacasarjana Universitas Airlangga, Surabaya.
- Sukei, 2006. *Dampak Semburan Lumpur Panas Lapindo Sidoarjo terhadap Perekonomian Masyarakat di Kabupaten Pasuruan*, Jurnal Eksekutif, Volume 6, Nomor 1 Februari 2009.
- Sztompka, Piotr. 2007. *Sosiologi Perubahan Sosial*, Jakarta, Prenada.
- Scott, James, C. 1989. *Moral Ekonomi Petani : Pergolakan dan Subsistensi di Asia Tenggara*, LP3ES, Jakarta.
- Titus, Milan, J. 1988. *Migrasi Antar Daerah di Indonesia*. Seri Penerbitan, Pusat Penelitian dan Studi Kependudukan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Todaro, M.P. 1978. *Economic Development in The Third World* (2nd edition). Longman Group Ltd., London.
- Weber, Max. 1969. *The Sociological of Religion*. Beacon Press, Boston.
- Wini, Tantiari. 1999. *Dampak Sosial Migran Tenaga Kerja ke Malaysia*. Populasi 10(2). Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.
- Wikipedia Indonesia, Banjir Lumpur Panas Sidoarjo 2006 dalam www.wikopedia.org, diakses pada tanggal, 21 Maret 2008.
- Wardaya, Sulistya. 2006. "Potret Bencana Sosial di Indonesia", Makalah disampaikan dalam sosialisasi dan serasehan bencana sosial di Dinas Kesejahteraan Sosial Provinsi Bengkulu.

